



The Habibie Center

THC REVIEW

Vol. 5/2018

Telaah Kritis Pilpres dan Pileg 2019

EDITOR:
Zamroni Salim
Mohammad Hasan Ansori





THC REVIEW

Vol.5/2018

TELAAH KRITIS PILPRES DAN PILEG 2019

Editor:

Zamroni Salim

Mohammad Hasan Ansori



THC REVIEW

VOL.5/2018

TELAAH KRITIS PILPRES DAN PILEG 2019

Terbit Sejak 19 November 2013

ISSN: 2339-2959

Penanggungjawab:

Hadi Kuntjara, Ph.D.

Mohammad Hasan Ansori, Ph.D.

Editor Pelaksana:

Zamroni Salim, Ph.D.

Usaha dan Sirkulasi:

Ghazali Hasan Moesa

Natassa Irena Agam

Desain dan Layout:

Lany Sekar

Penerbit:

The Habibie Center

Alamat Redaksi:

Jl. Kemang Selatan no.98, Jakarta 12560, Indonesia

Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212

e-mail: thc@habibiecenter.or.id, www.habibiecenter.or.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	v
<i>Hana Hanifah</i>	1
HANYA MEMILIH, JARANG DIPILIH: PEREMPUAN, PEMILIHAN UMUM, DAN POLITIK DI INDONESIA	
<i>Fina Astriana</i>	14
PEMILU 2019: PERBANDINGAN VISI MISI EKONOMI CALON PRESIDEN	
<i>Zamroni Salim</i>	33
HOAX DAN PERILAKU MASYARAKAT MENJELANG PILPRES DAN PILEG 2019	
<i>Mohammad Hasan Ansori</i>	44
ISLAMISME DI KAMPUS DALAM PUSARAN POLITIK IDENTITAS DI PEMILU 2019	
<i>Wirya Adiwena, Vierna Tasya Wensatama</i>	57
PERSEPSI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PANDANGAN DAN REKAM JEJAK HAM CALON PRESIDEN 2019	

Kata Pengantar

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang beragam suku, budaya, bahasa dan agama. Dalam berbagai keragaman itulah Indonesia disatukan sebagai negara persatuan. Dalam membangun perekonomiannya, Indonesia memiliki sejumlah peluang dan tantangan; demikian juga untuk membangun bidang sosial dan politik. Lagi-lagi keberagaman dan perbedaan cara pandang dengan latar belakang suku, budaya agama mempengaruhi cara mereka berinteraksi dalam kehidupan, termasuk berinteraksi dalam dunia maya dengan memanfaatkan sejumlah perangkat teknologi dan sosial media yang ada.

Memasuki tahun politik 2019 menjadi tahun yang cukup sibuk bagi bangsa Indonesia, tidak hanya pra politisnya tetapi juga masyarakat umum sebagai calon pemilih (*voters*). Pesta demokrasi sewajarnya diharapkan bisa terlaksana dengan baik, aman, dan menyenangkan bagi rakyat Indonesia dalam memilih wakilnya dan memilih pemimpinnya untuk masa lima tahun mendatang (2019 – 2024). Namun demikian, dalam tahun politik ini, kegaduhan politik bisa saja terjadi yang berasal dari berbagai macam sumber.

Indonesia mempunyai masyarakat yang cukup dinamis dan demokratis. Karakteristik masyarakat yang demikian, bisa merupakan sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam upaya untuk melakukan pembangunan secara optimal dengan hasil pembangunan yang maksimal. Pergantian pimpinan di Indonesia akan terjadi lagi di tahun 2019.

Saat ini Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo (Jokowi) telah dan sedang menjalankan pemerintahan dan membangun Indonesia. Banyak faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan pembangunan, dan ini sudah dibuktikannya. Namun, masih ada sejumlah permasalahan yang ada, baik itu yang menyangkut pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan permasalahan lainnya. Dengan kondisi yang demikian, dalam memasuki tahun politik ini, berbagai penilaian muncul baik yang berasal dari kubu pendukung pemerintah yang berkuasa (*incumbent*) Jokowi dan Ma'ruf Amin maupun kubu penantangannya (Prabowo Sandi).

Melihat fenomena tersebut di atas The Habibie Center (THC) berusaha melakukan review terhadap dinamika dan permasalahan terkait dengan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, sehingga pesta demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju. Tulisan yang ada dalam THC Review 2016 ini merupakan sumbangsih dari civitas the Habibie Center dalam ikut memberikan masukan terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia.

THC Review 2018 yang mengambil tema: Telaah Kritis Pilpres dan Pileg 2019, tersusun dari lima tulisan. Tulisan-tulisan tersebut mencoba mengangkat isu terkait dengan dinamika masyarakat Indonesia yang akan memasuki pesta demokrasi 2019. Secara singkat, sejumlah tulisan tersebut adalah:

Tulisan Pertama, mengkritisi tentang tingkat partisipasi perempuan Indonesia dalam politik. Proses demokratisasi di Indonesia masih berjuang untuk mencapai kondisi ideal bagi partisipasi perempuan. Tulisan ini memaparkan kondisi partisipasi dan representasi perempuan dalam politik Indonesia, khususnya berkaitan dengan posisinya sebagai kandidat yang dipilih sebagai pemimpin politik dan pembuat kebijakan. Tulisan ini juga membahas posisi perempuan sebagai pemilih dan konsepsi kepentingan perempuan dalam pemilu; sekaligus membahas tantangan dan peluang untuk meningkatkan posisi perempuan dalam politik Indonesia.

Tulisan Kedua, membahas isu tentang Visi dan Misi dalam bidang ekonomi oleh masing-masing Capres. Pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong". Sementara itu, pasangan Prabowo Sandi mengusung visi "Terwujudnya

Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri diatas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Baik tim Joko Widodo – Ma'ruf Amin maupun tim Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memiliki kelebihan dan kekurangan pada misi ekonomi mereka. Kedua pasangan secara umum ingin membangun perekonomian Indonesia lebih baik dengan cara masing-masing. Satu hal yang harus diwujudkan dalam bidang ekonomi adalah presiden dan wakil presiden berikutnya haruslah mampu membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera.

Tulisan Ketiga, membahas tentang isu yang cukup sentral dalam pemilihan umum yaitu kemunculan hoax yang cukup meresahkan masyarakat. Selain itu juga membahas bagaimana perilaku masyarakat Indonesia yang seharusnya dalam menyongsong tahun politik dengan Pilpres dan Pilegnya di tahun 2019. Di tengah derasny arus informasi yang sedmikian cepat, masyarakat diimbau untuk menyaring berita yang masuk, kemudian bisa menyebarkannya bila diyakini bahwa berita tersebut benar, melalui berbagai sarana komunikasi yang ada. Perilaku kita merupakan tanggungjawab kita yang mempunyai konsekuensi hukum. Dalam masa Pilpres/Pileg 2019 ini diharapkan kita bisa menyaring informasi yang masuk ke kita, dan mendistribusikannya (*sharing*) kepada pihak lain. Kemudian, bila kita yakin bahwa informasi tersebut benar, baik dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka kita bisa menyebarkannya.

Tulisan Keempat, adalah mengkritisi tentang tantangan dalam Pemilu 2019 yaitu menguatnya politik identitas dalam demokrasi di Indonesia, yang di tahun 2019 akan dilakukan secara bersamaan antara Pilpres dan Pileg. Basis dukungan politik untuk kedua pasangan Capres Cawapres secara umum merupakan kristalisasi dan/atau perpanjangan tensi antara kelompok-kelompok yang mengklaim Islamis anti-Ahok dan kelompok-kelompok pro-Ahok. Pemilu 2019 bukan hanya akan merupakan pertarungan ulang antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, tetapi juga akan menjadi representasi pertarungan gerakan Islamis anti-Ahok dengan pro-Ahok dengan muara kuatnya yaitu politik identitas.

Kata Pengantar

Tulisan Kelima, isu HAM dalam Pilpres 2019 mungkin tidak dapat dipisahkan dari munculnya aktor-aktor masyarakat sipil yang menjadi semakin aktif mengemukakan isu HAM ke publik. Tulisan ini membahas isu HAM melalui kacamata masyarakat sipil terhadap pandangan dan rekam jejak HAM calon presiden 2019. Dari perspektif HAM, kedua calon presiden sama-sama memiliki catatan yang harus kembali dicermati secara kritis. Berdasarkan rekam jejak yang ada, kedua calon presiden masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam isu HAM yang harus kembali dikerjakan. Meski demikian, isu HAM kelihatannya masih belum akan menjadi fokus, baik semasa kampanye hingga nanti saat salah satu di antara mereka terpilih sebagai Presiden RI.

Dengan berbagai analisis yang mengarah pada perilaku masyarakat dan juga elit politik dalam menyikapi rencana hajatan besar bangsa Indonesia di tahun 2019, buku THC Review ini tentu saja masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun demikian kami berharap buku ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dari the Habibie Center terhadap tumbuhnya demokrasi di Indonesia yang lebih sehat dan bisa memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia, dan kehidupan sosial politik yang lebih tertata dengan baik. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan terbitan THC Review di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, November 2018

Editor

Zamroni Salim

**HANYA MEMILIH, JARANG DIPILIH:
PEREMPUAN, PEMILIHAN UMUM, DAN POLITIK DI INDONESIA**

Hana Hanifah
*Peneliti The Habibie Center,
Email: hana@habibiecenter.or.id*

Pembahasan mengenai posisi perempuan dalam pemilihan umum dan politik memang bukan hal yang baru. Topik tersebut masih dianggap penting karena masalah partisipasi perempuan dalam politik, baik secara kuantitas dan kualitas, belum juga terselesaikan. Ini bukan hal yang unik bagi Indonesia saja karena masalah yang sama masih terjadi di banyak negara lain. Literatur mengenai gender dan politik sudah banyak membahas masalah ketimpangan gender dalam beragam aktivitas politik, termasuk pemilihan umum, kampanye, kepemimpinan, hingga ketimpangan dalam akses informasi serta sosialisasi politik (Paxton, Kunovich, & Hughes, 2007). Kajian-kajian ini pada umumnya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan mengenai implikasi dari partisipasi perempuan dalam politik terhadap hasil pemilihan dan kebijakan yang dihasilkan. Misalnya, apakah partisipasi dan representasi perempuan akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhadap aktivitas politik dan pembuatan kebijakan? Apakah perempuan mempunyai pola yang berbeda dalam menggunakan hak pilihnya? Apakah partisipasi dan

representasi perempuan dalam politik akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi kesetaraan gender pada umumnya?

Pada umumnya, argumentasi dalam kajian posisi perempuan dalam politik mengarah pada pentingnya aktivisme perempuan yang telah berkontribusi secara substantif dalam kehidupan politik. Secara global, sebenarnya sudah ada trend yang menunjukkan perbaikan partisipasi perempuan dalam politik, khususnya keanggotaan dalam parlemen (UN Women, 2017). Namun, perkembangan tersebut masih sangat lambat dan perempuan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk akses terhadap pembiayaan kampanye dan diskriminasi akibat struktur partai yang lebih mengunggulkan laki-laki dan maskulinitas (UN Women, 2017). Melihat trend tersebut, apakah Indonesia mempunyai masalah yang sama? Atau, apakah Indonesia mempunyai pencapaian yang lebih baik dalam hal partisipasi dan representasi perempuan dalam politik?

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menjelaskan posisi serta peluang dan tantangan bagi perempuan Indonesia dalam partisipasi pemilihan umum dan politik. Dalam pembahasannya, bagian pertama akan memaparkan kondisi partisipasi dan representasi perempuan dalam politik Indonesia, khususnya berkaitan dengan posisinya sebagai kandidat yang dipilih sebagai pemimpin politik dan pembuat kebijakan. Bagian kedua membahas posisi perempuan sebagai pemilih dan konsepsi kepentingan perempuan dalam pemilu. Bagian ketiga menguraikan tantangan dan peluang untuk meningkatkan posisi perempuan dalam politik Indonesia, yang kemudian dilanjut dengan bagian terakhir yang memaparkan kesimpulan dan penutup.

PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DAN KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA

Sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 hingga pemilihan umum tahun 2019 mendatang, belum ada lagi perempuan yang menjadi calon pemimpin negara. Setelah dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, yang juga pernah menjabat sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia pada periode 2001-2004, adalah calon presiden perempuan terakhir dalam pemilihan umum negara ini. Sebenarnya sudah ada beberapa perempuan yang sempat diusulkan akan menjadi calon wakil presiden pada pemilihan umum mendatang, seperti misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti. Tetapi pada akhirnya, calon pemimpin eksekutif negara Indonesia tetap didominasi laki-laki.

Persoalan kurangnya calon pemimpin politik perempuan juga terlihat dalam lembaga legislatif atau parlemen. Sebenarnya sudah ada basis legal kebijakan afirmasi untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam pemilihan calon anggota legislatif (caleg) melalui peraturan sistem kuota. Dalam UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 246 ayat (2) disebutkan bahwa di dalam daftar bakal caleg (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dari setiap tiga orang bakal calon harus terdapat paling sedikit satu orang perempuan sebagai bakal calon. Sistem ini kemudian disebut sebagai *zipper system*. Keterwakilan ini juga sudah diharuskan dalam partai politik melalui UU No. 2 Tahun 2008 yang mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 10 tahun 2008 juga menekankan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan tingkat pusat untuk dapat ikut serta dalam pemilu. Angka 30 persen ini diputuskan berdasarkan hasil penelitian PBB yang menemukan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga politik akan lebih efektif jika ada keterwakilan minimal 30 persen (Hidayah, 2018).

Jika dilihat dari kuota yang diharuskan oleh beberapa undang-undang tersebut, partai politik di Indonesia faktanya sudah dapat memenuhi ketentuan. Pada pemilu 2014 dan 2019, tercatat bahwa seluruh partai politik sudah memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu, dengan 16 partai politik bahkan melebihi kuota 30 persen (Perludem, 2018). Namun pada kenyataannya, setelah proses pemilihan umum, hanya sedikit perempuan yang akhirnya dapat duduk di lembaga legislatif Indonesia.

Secara kuantitatif, tren keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak pemilu tahun 1999 hingga 2014 masih belum mencapai kuota 30 persen dan belum ada perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia hanya memperoleh ranking ke-enam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan persentase 19,8 persen, yang cukup jauh dengan rata-rata dunia di angka 23,6 persen (Gerintya, 2017). Persentase keterwakilan perempuan memang menunjukkan adanya tren kenaikan, mulai dari 8,8 persen pada pemilu tahun 1999, kemudian naik menjadi 11,82 persen pada pemilu 2004

dan 17,86 persen pada periode 2009-2014, tetapi kemudian sedikit menurun pada periode 2014-2019 dengan proporsi 17,32 persen dari jumlah total anggota DPR RI (Gerintya, 2017). Namun, kenaikan tersebut tidak signifikan dan masih fluktuatif. Tren yang sama juga terlihat dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dan proporsi daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Proporsi perempuan hanya sekitar 7,47 persen dari total bakal calon kepala daerah pada pilkada tahun 2015, yang kemudian sedikit menurun menjadi 7,17 persen pada tahun 2017 dan naik menjadi 8,85 persen pada tahun 2018 (Amindoni, 2018). Angka tersebut mengindikasikan bahwa representasi kuantitatif perempuan dalam lembaga legislatif, baik nasional maupun daerah, masih belum baik.

Kemudian, masih ada juga masalah dalam keterwakilan isu. Keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan dianggap penting dengan asumsi bahwa keterwakilan tersebut akan mendorong adanya keberpihakan terhadap isu perempuan. Namun pada kenyataannya di Indonesia, keterwakilan perempuan bahkan tidak menjamin asumsi tersebut. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data dari Perludem, hanya 12 dari 23 calon terpilih perempuan dalam Pilkada 2017 yang mengusung isu-isu yang secara tradisional dianggap berpihak tersebut perempuan dan perlindungan anak (Amindoni, 2018). Secara akademik sebenarnya konsepsi pemisahan isu sebagai "isu perempuan" masih diperdebatkan sebagai hal negatif yang dapat mempertegas stratifikasi isu berdasarkan dikotomi konstruksi gender yang selama ini memomorduakan perempuan. Selain itu, tentu saja isu yang secara tradisional dianggap sebagai masalah perempuan tidak harus selalu diwakili oleh perempuan, dan sebaliknya, calon anggota legislatif perempuan tentu dapat mengusung isu lain yang lebih luas. Tetapi sayangnya, kondisi politik Indonesia masih belum mencapai tahap kesadaran mengenai pemahaman keterwakilan dan representasi isu tersebut. Asumsi bahwa terdapat isu-isu khusus yang menyangkut perempuan, yang hanya dapat diwakili oleh perempuan, sepertinya masih sangat kuat di Indonesia, yang kenyataannya juga masih belum dapat memperbaiki kondisi keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik.

Di sisi lain, bagaimana dengan posisi perempuan sebagai pemilih dalam pemilihan umum? Apakah perempuan mempunyai posisi tawar yang lebih baik sebagai pemilih? Bagian selanjutnya membahas secara singkat posisi perempuan sebagai pemilih, khususnya terkait dengan persepsi umum mengenai kepentingan perempuan dalam politik.

ANTARA 'EMAK-EMAK' ATAU 'IBU BANGSA': PEREMPUAN SEBAGAI PEMILIH DALAM POLITIK INDONESIA

Partisipasi perempuan dalam memilih pemimpin negara dan juga anggota legislatif merupakan bagian penting dari aktualisasi kesempatan dan kebebasan untuk memilih dalam sistem demokrasi. Selain itu, partisipasi perempuan dalam pemilihan umum juga dianggap penting sebagai sarana bagi perempuan untuk menyalurkan suara mereka, yang diasumsikan dapat memperbaiki representasi isu perempuan dalam pembuatan kebijakan karena perempuan dianggap mempunyai preferensi untuk isu-isu yang berhubungan dengan masalah-masalah khusus perempuan. Secara kuantitatif, signifikansi perempuan sebagai pemilih, khususnya pada pemilu 2019 terlihat dari jumlahnya yang lebih dari 100 juta jiwa, atau sekitar 126 ribu lebih banyak dibandingkan pemilih pria (Bayu, 2018). Dari sisi penggunaan hak suara, partisipasi pemilih perempuan juga sudah baik. Dalam Pilkada serentak tahun 2018, dilaporkan bahwa persentase partisipasi pemilih perempuan melebihi laki-laki, khususnya untuk di wilayah perkotaan dan kabupaten. Di perkotaan misalnya, tingkat partisipasi perempuan mencapai hampir 80 persen, sedangkan partisipasi laki-laki hanya sekitar 70 persen. Contoh lainnya, dalam pemilihan gubernur, partisipasi perempuan mencapai 77,68 persen, cukup tinggi dibandingkan dengan partisipasi laki-laki yang hanya 73,46 persen (Prasetia, 2018).

Jumlah dan potensi partisipasi perempuan yang besar sebagai pemilih ini juga mempengaruhi cara penyampaian isu dalam kampanye. Hal ini jelas terlihat dalam kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang. Persaingan antara tagline *'The Power of Emak-Emak'* dan *'The Power of Ibu Bangsa'* seperti menunjukkan bahwa pemilih perempuan mendapatkan perhatian yang istimewa dalam kampanye. Di satu sisi, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mempopulerkan *hashtag* atau tagar #ThePowerOfEmakEmak di media sosial, khususnya Twitter, dan secara konsisten menggunakan istilah 'emak-emak' ketika menyebut atau membahas masalah ekonomi dan sosial yang diidentikan dengan masalah perempuan di Indonesia, seperti masalah kenaikan harga bahan-bahan pokok.¹ Di sisi lain, sebagai respon terhadap penggunaan istilah 'Emak-Emak' tersebut, dalam Temu Nasional Kongres Wanita Indonesia ke-90 dan Sidang Umum International Council of Woman (ICW) ke-35, pasangan Joko Widodo

¹ Sebagai contoh lihat video kampanye di akun Twitter tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno: <https://twitter.com/adilmakmur02/status/1051312478934552576>. Status akun Twitter tersebut secara konsisten menyebut pemilih perempuan dengan istilah 'Emak-Emak.' Lihat di: <https://twitter.com/adilmakmur02>

dan Ma'ruf Amin beserta pendukungnya kemudian mencoba kembali mereproduksi istilah 'Ibu Bangsa' dengan *tagline* 'The Power of Ibu Bangsa' untuk menyebut dan mendeskripsikan perempuan Indonesia yang dianggap sudah banyak berkontribusi "menggerakkan ekonomi keluarga untuk masyarakat" (Prasetya, 2018).²

Dibalik perbedaan penggunaan istilah tersebut, kedua tim pada dasarnya sama-sama mengindikasikan bahwa perempuan mempunyai pengaruh yang signifikan sebagai pemilih di Indonesia sehingga harus mendapatkan perhatian yang khusus dalam kampanye politik. Selain karena jumlahnya, pemilih perempuan juga menjadi sasaran khusus dalam pemilu karena diasosiasikan dengan beberapa karakter yang dianggap menguntungkan. Perempuan dianggap lebih loyal dan mempunyai peran strategis dalam masyarakat untuk berkampanye secara sukarela dengan pendekatan yang sederhana, misalnya melalui perkumpulan arisan, kelompok pengajian, dan kegiatan berbasis komunitas lainnya (BBC Indonesia, 2018). Selain karakter, pemilih perempuan juga menjadi sasaran khusus karena dianggap mempunyai kepentingan isu yang berbeda, yang umumnya terkait dengan posisi unik mereka dalam fungsi domestik sebagai ibu atau ibu rumah tangga. Hal ini sangat terlihat jelas dari strategi penggunaan istilah 'emak-emak' dan 'ibu bangsa,' yang keduanya sangat erat kaitannya dengan peran dan fungsi perempuan di ranah domestik sebagai pengurus rumah tangga sehari-hari dan mendidik anak.

Terlepas dari perbedatan mengenai istilah mana yang lebih baik bagi perempuan, penggunaan istilah 'emak-emak' dan 'ibu bangsa' tersebut sebenarnya merefleksikan dua hal penting terkait posisi perempuan sebagai pemilih. Pertama, terlihat bahwa terdapat anggapan bahwa posisi perempuan Indonesia dapat digeneralisasi dalam kategorisasi fungsinya di ranah domestik sebagai ibu atau 'emak' yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Penekanan perempuan sebagai 'ibu bangsa' dan 'emak-emak' ini secara tidak langsung telah mereproduksi bias gender bahwa peran utama dan yang paling penting bagi perempuan adalah peran domestiknya, bukan peran lain. Hal ini tidak saja membatasi representasi kepentingan dengan mengeksklusikan perempuan yang belum atau tidak berminat untuk memenuhi ekspektasi sosial menjadi emak atau ibu, tetapi juga mempertegas keterbatasan cakupan isu yang dapat dianggap sebagai isu perempuan, yang sebenarnya sangat luas karena isu dalam politik dan pengambilan kebijakan seharusnya dipahami secara netral.

² Lihat juga status akun Twitter resmi Presiden Joko Widodo yang menggunakan istilah 'Ibu Bangsa': <https://twitter.com/jokowi/status/1040798821591085056>.

Kedua, penggunaan dua istilah tersebut juga seperti tidak memperhatikan *intersectionality* atau keberagaman identitas perempuan, baik dari segi kelas, usia, maupun aspirasi hidup. Masalah ini khususnya terkait dengan makna konotasi dari ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’ yang mengacu pada stigma kategori kelompok spesifik di Indonesia. Di satu sisi, istilah ‘emak-emak’ merupakan istilah informal yang diidentikkan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah, yang biasanya merupakan ibu rumah tangga dalam makna konvensional, yang masih pergi ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sehingga kepentingannya erat dengan harga bahan pokok dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Atiandina, 2018). Di sisi lain, ‘ibu bangsa’ dianggap mempunyai konotasi yang lebih berhubungan dengan nasionalisme, yang dapat mencakup perempuan mana saja yang dapat berperan untuk kemajuan negara (Atiandina, 2018). Meskipun tidak ada salahnya dengan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga di kelas manapun, tetapi penggunaan istilah tersebut meminggirkan kategori perempuan lain, yang mempunyai kepedulian terhadap isu lain di luar harga bahan pokok dan mendidik anak.

Dalam posisinya sebagai pemilih, perempuan ternyata masih belum juga mendapatkan representasi yang baik dan efektif. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut? Apa yang membuat posisi perempuan sebagai kandidat pemimpin dan pemilih dalam politik Indonesia masih juga bermasalah? Bagian selanjutnya berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan memaparkan beberapa tantangan utama dan juga peluang untuk memperbaiki keterwakilan serta representasi perempuan dalam politik di Indonesia.

TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK YANG LEBIH BAIK

Salah satu tantangan untuk meningkatkan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia adalah memperbesar kemungkinan bagi kandidat perempuan untuk dipilih sebagai pemimpin, baik dalam lembaga legislatif maupun partai politik. Tidak cukup bagi partai politik untuk memenuhi kuota keanggotaan perempuan, tetapi kesempatan perempuan untuk benar-benar dipilih sebagai pemimpin juga harus lebih diperhatikan. Secara praktis, hal ini dapat diperbaiki misalnya dengan menempatkan kandidat perempuan sebagai prioritas dalam pemilu dan memberikan nomor urut awal (satu atau dua). Hal ini terkesan tidak penting, tetapi, berdasarkan data dari pemilu tahun 2009 dan 2014,

tingkat kesuksesan bagi calon anggota legislatif perempuan bernomor urut satu dari beberapa partai politik besar di Indonesia mencapai 90 sampai 100 persen (Prihatini, 2018). Ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara penempatan nomor urut kandidat perempuan dengan kesempatannya untuk terpilih. Namun sayangnya, terdapat pola umum di antara partai politik di Indonesia untuk tidak menempatkan perempuan dalam nomor urut satu. Secara umum proporsi perempuan sebagai caleg dengan nomor urut satu dalam pemilu rata-rata hanya 19 persen, dan persentase perempuan sebagai pilihan nomor urut dua hanya 30 persen (Perludem, 2018). Tren tersebut memperlihatkan bahwa kuota saja sebenarnya tidak cukup, sehingga kebijakan afirmasi juga harus diarahkan untuk menjamin partai politik supaya memberikan prioritas bagi kandidat perempuan agar dapat benar-benar terpilih menjadi pemimpin politik serta pembuat kebijakan.

Tentu saja masalah nomor urut ini bukan satu-satunya penyebab kurangnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin politik atau pembuat kebijakan. Kalaupun posisi nomor urut bukan penentu prestasi dalam pemilu, masih ada permasalahan yang menyangkut keterwakilan dan regenerasi kepemimpinan politik perempuan dalam tubuh internal partai politik. Jika kepemimpinan politik perempuan dalam partai politik sudah dibina dengan baik, maka seharusnya keterwakilan perempuan dalam pemilu dan kesempatan terpilihnya juga akan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, masih belum ada verifikasi bahwa partai politik di Indonesia benar-benar sudah mengikuti peraturan untuk menempatkan minimal 30 persen anggota perempuan dalam kepengurusan inti. Bahkan sempat diberitakan bahwa ketentuan yang seharusnya menjadi syarat dalam mengikuti pemilu tersebut tidak diverifikasi dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga bisa saja ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tidak dipenuhi (Atiandina, 2018). Masalah keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik juga diindikasikan oleh minimnya jumlah perempuan sebagai pemimpin partai politik. Tercatat bahwa dari 16 partai, hanya ada dua partai yang dipimpin perempuan, yaitu partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Grace Nathalie sejak 2014 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri sejak 1999 (Prihatini, 2018). Dalam hal ini partai politik lagi-lagi harus membenahi diri secara internal untuk memberikan ruang bagi perempuan agar dapat memimpin dan memperbaiki kualitas kapasitasnya sebagai pemimpin politik.

Secara umum, sebenarnya yang menjadi tantangan utama yang menghambat keterwakilan perempuan dalam politik, baik dalam posisinya sebagai pemilih dan kandidat, adalah adanya konstruksi sosial mengenai maskulinitas dan femininitas yang kaku dan hierarkis, yang masih sangat dominan di Indonesia. Sifat-sifat maskulin, serta berbagai isu yang berhubungan dengan sifat-sifat tersebut, dianggap lebih unggul dan lebih penting dalam pembuatan kebijakan sehingga mempengaruhi munculnya masalah ketimpangan partisipasi dan representasi segala hal yang terkait dengan femininitas, termasuk perempuan dan isu-isu yang dianggap identik dengan perempuan. Sebagai ilustrasi, kepercayaan budaya atau interpretasi agama turut membentuk persepsi bahwa pemimpin adalah laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin atau tampil sebagai pengambil kebijakan di ranah publik, sehingga perempuan jarang dipilih sebagai pemimpin. Anggapan bahwa perempuan secara kodrati adalah ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya terus direproduksi dalam interaksi sosial sehingga pemimpin perempuan masih menjadi pengecualian dalam politik Indonesia, dan kesuksesannya biasanya tergantung pada pengaruh jaringan yang dimilikinya, termasuk suami atau orang tua (Abdullah, 2015).

Tetapi tentu saja tidak semua perempuan mempunyai kesempatan atau kapasitas untuk membangun jaringan atau modal politik lainnya untuk menjadi calon pemimpin politik, atau dipercaya untuk menjadi pemimpin politik. Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh penekanan konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan kapasitas individu, sumber daya ekonomi, serta jaringan sosial di ranah publik, yang merupakan modal utama untuk aktualisasi potensi politik yang dimiliki. Secara kapasitas, perempuan di Indonesia sebenarnya sudah mempunyai akses yang lebih baik untuk mengembangkan keahlian, dan bahkan kandidat anggota legislatif perempuan semua mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan berasal dari keluarga kelas menengah dengan posisi yang baik juga (Amindoni, 2018). Tantangan yang lebih berat adalah eksklusivitas jaringan politik yang membatasi akses bagi perempuan untuk menjadi bagian dari partai politik atau kandidat pemilu. Jaringan ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan keterlibatan perempuan dalam partai politik dan pemilu. Jika dilihat dari besarnya proporsi kandidat perempuan yang berasal dari jejaring kekerabatan (40 persen) dan pengusaha (25 persen), akses perempuan untuk terjun dalam dunia politik di Indonesia sepertinya masih sangat bergantung pada koneksi kekerabatan dengan elit politik yang sudah ada dan juga akses terhadap

modal atau jejaring untuk mendapatkan modal (Amindoni, 2018). Selain mengindikasikan adanya eksklusivitas dalam keikutsertaan perempuan dalam pemilu, data ini juga menunjukkan pentingnya membuka akses bagi perempuan di Indonesia, terutama yang memang sudah mempunyai kualitas kapabilitas yang baik, untuk memperluas serta memperbaiki koneksi atau jejaringnya agar dapat berpartisipasi dalam lingkaran keanggotaan partai politik serta kepemimpinan politik.

Terkait dengan hal tersebut, strategi politik yang menekankan pada reproduksi konstruksi gender yang kaku dan hierarkis sebenarnya berpotensi mengakarkan posisi perempuan di ranah domestik, yang kemudian kembali mereproduksi hambatan perempuan untuk mewakili dan terwakili dengan baik. Strategi kampanye yang memberikan label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’ sangat berpotensi menimbulkan reproduksi bias gender tersebut. Ini sangat disayangkan karena selain sulit untuk menjadi pemimpin, perempuan juga ternyata tidak direpresentasikan dengan baik sebagai sasaran kebijakan. Dalam narasi kampanye kebijakan, perempuan masih juga ditempatkan “dalam kodratnya” di ranah domestik sebagai pengatur uang belanja rumah tangga dan pendidik keturunannya. Memang posisi perempuan sebagai ibu rumah sudah seharusnya dihargai dan diberikan perhatian yang khusus dalam pembuatan kebijakan, tetapi isu-isu tersebut harus dipahami secara mendalam tidak hanya dibingkai dalam pemahaman yang terbatas sebagai strategi pragmatis untuk menarik pemilih.

Masalah keterbatasan pemahaman mengenai peran perempuan dan isu yang menjadi kepentingan perempuan ini mengindikasikan adanya politisasi posisi perempuan sebagai pemilih, yang sebenarnya hanya dilihat sebagai objek untuk memperkuat strategi dalam memenangkan pemilu. Kenyataannya, calon presiden dan wakil presiden, yang semuanya laki-laki, masih belum mempunyai sensitivitas gender dalam melihat perempuan sebagai kelompok pemilih beserta kepentingan-kepentingannya. Selain itu, masih terdapat juga kecenderungan untuk mereproduksi konstruksi identitas gender yang seolah membatasi ekspektasi dan imajinasi mengenai potensi dan peran perempuan. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya kesadaran mengenai pentingnya perempuan dalam pemilihan umum dapat berdampak positif terhadap keterwakilan perempuan dan representasi isu. Untuk itu, sensitivitas gender juga harus dipahami oleh calon-calon kandidat pemimpin politik, dan juga harus dipromosikan menjadi salah satu faktor penting dalam menilai strategi kampanye serta kebijakan-kebijakan yang dijanjikan dalam pemilu.

Namun, melihat bahwa sudah muncul banyak analisis dan opini yang mengkritik penggunaan reproduksi bias gender tersebut sebagai strategi politik, sebenarnya sudah ada lapisan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan mampu mengutarakan suaranya untuk memperbaiki proses politik. Hal ini seharusnya mendapat dukungan agar menjadi sesuatu yang lebih umum dan dapat juga dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Selain sosialisasi, seperti halnya pendidikan juga harus dibenahi untuk membentuk pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam politik dan membuat diskusi mengenai kesempatan serta kemampuan perempuan sebagai pemimpin tidak lagi tabu. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat umum yang akan merasakan implikasi dari kampanye atau kebijakan yang diterbitkan, tetapi juga untuk para kandidat pemimpin politik agar dapat memperbaiki kualitas substansi kampanye serta kebijakannya.

KESIMPULAN

Demokrasi secara ideal mensyaratkan keterwakilan semua golongan dan lapisan warga negara dalam pembuatan kebijakan serta kepemimpinan politik, baik secara jumlah maupun substansi. Dalam praktiknya, proses demokratisasi di Indonesia masih berjuang untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Belum juga masuk dalam masalah keterwakilan untuk minoritas dengan identitas gender lainnya yang masih menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan, Indonesia masih mempunyai masalah serius dalam memperbaiki keterwakilan dan representasi perempuan dalam politik. Seperti halnya posisi utama perempuan Indonesia dalam pemilihan umum dan politik masih sebagai pemilih bukan kandidat atau calon pemimpin yang dipilih. Selain masih belum banyak perempuan yang dipilih sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin negara, isu-isu substansi dalam pembuatan kebijakan juga belum merepresentasikan tujuan kesetaraan gender dengan baik. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan keterwakilan serta representasi perempuan dalam pemilihan umum dan politik di Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas individu, memperbesar kesempatan untuk menjadi pemimpin, dan memperbaiki pemahaman mengenai sensitivitas gender. Usaha ini bukannya tidak mungkin, tetapi memang membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Indonesia masih harus melakukan banyak evaluasi dan belajar dari pengalaman negara lain terkait dengan isu ini. Pada intinya, lebih dari sekedar 'emak-emak' dan 'ibu bangsa,' perempuan Indonesia harus juga diperhatikan sebagai calon pemimpin negara dan politik, yang tidak saja mewakili kelompoknya, tetapi juga dapat merepresentasikan isu kesetaraan gender secara substansial dalam pembuatan kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, I. (2015). Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan - Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan dalam Pencalonan Legislatif. *Palastren*, 7(2), 277–290.
- Amindoni, A. (2018). Keterwakilan Perempuan di Pilkada 2018 Naik, Keberpihakan Pada Agenda dan Isu Perempuan “Masih Rendah.” Diakses Oktober 12, 2018, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43139445>
- Atiandina, D. (2018). Adu Strategi Politik Emak-Emak dan Ibu Bangsa di Pilpres 2019. Diakses Oktober 12, 2018, dari <https://www.msn.com/id-id/berita/other/adu-strategi-politik-emak-emak-dan-ibu-bangsa-di-pilpres-2019/ar-BBNm7MK?li=AAzUIhf>
- Bayu, D. J. (2018). Pemilih Perempuan Lebih Banyak Dibanding Pria di Pilpres 2019. Diakses Oktober 12, 2018, dari <https://katadata.co.id/berita/2018/09/05/pemilih-perempuan-lebih-banyak-dibanding-pria-di-pilpres-2019>
- BBC Indonesia. (2018). Istilah “emak-emak” dan “ibu bangsa”: Cara Jokowi dan Prabowo Memikat Pemilih Perempuan. Diakses Oktober 12, 2018, dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45563444>
- Gerintya, S. (2017). Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. Diakses Oktober 12, 2018, dari <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-tercapai-cv8q>
- Hidayah, S. N. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Diakses Oktober 12, 2018, dari <https://news.detik.com/kolom/4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>
- Paxton, P., Kunovich, S., & Hughes, M. M. (2007). Gender in Politics. *Annual Review of Sociology*, (33), 263–284.
- Perludem. (2018). Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019. Diakses Oktober 12, 2018, dari <http://www.perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>

- Prasetia, F. A. (2018). Pilkada Serentak 2018, Tingkat Partisipasi Perempuan Cukup Tinggi. Diakses Oktober 12, 2018, dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/11/pilkada-serentak-2018-tingkat-partisipasi-perempuan-cukup-tinggi>
- Prihatini, E. S. (2018). Bagaimana Mendongkrak Keterwakilan Perempuan di DPR? Diakses October 12, 2018, dari <https://theconversation.com/bagaimana-mendongkrak-keterwakilan-perempuan-di-dpr-89541>
- UN Women. (2017). Women's political parity slow to grow as UN launches latest 'Women in Politics' map. Diakses October 12, 2018, dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/03/womens-political-parity-slow-to-grow-as-un-launches-latest-women-in-politics-map/>

**PEMILU 2019:
PERBANDINGAN VISI MISI EKONOMI CALON PRESIDEN**

Fina Astriana
Peneliti The Habibie Center,
Email: fina.astriana@habibiecenter.or.id

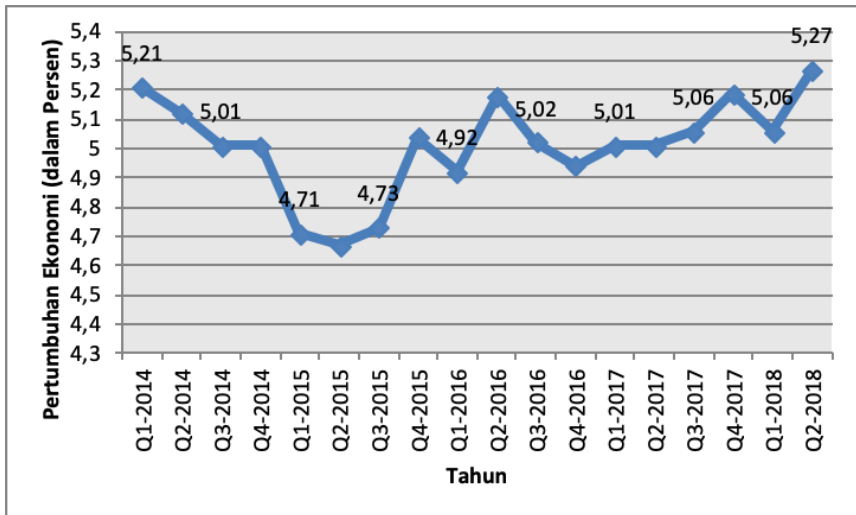
PENDAHULUAN

Tahun 2019 merupakan tahun politik yang menentukan arah Indonesia lima tahun ke depannya dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, salah satu isu utama yang akan menjadi perhatian utama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih stagnan di kisaran 5 persen pun perlu mendapat perhatian. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2014 – 2017 adalah 5 persen. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen dan kemudian turun ke 4,88 persen di 2015. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,03 persen di tahun 2016 dan 5,07 persen di 2017. Pada kuartal II tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,27 persen (y-on-y). Bila dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi

sebesar 4,21 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat hingga 32,52 persen (BPS, 2018a). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 akan berada di sekitar 5,14 persen hingga 5,21 persen. Angka ini dibawah asumsi pertumbuhan ekonomi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai 5,4 persen (CNN Indonesia, 2018a).

**Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Kuartal I 2014 – Kuartal II 2018)**



Sumber : Kompas (2018a)

Masalah lain yang perlu diwasapadai adalah adanya ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dengan negara-negara maju dan berkembang seperti Uni Eropa dan Tiongkok. Pemberlakuan tarif dan aksi proteksionisme Pemerintahan Trump telah menimbulkan kecemasan bahwa kebijakan tersebut akan membuat perdagangan internasional terganggu. Meskipun hingga saat ini Indonesia bukan merupakan target utama dari kebijakan perdagangan Trump, namun Indonesia pun dapat terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah

satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari persaingan dagang ini adalah dengan meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara non-tradisional.

Beberapa masalah di atas merupakan beberapa masalah ekonomi yang akan dihadapi oleh pasangan capres-cawapres 2019 yaitu pasangan Joko Widodo – Maruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

VISI MISI EKONOMI JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN

Pasangan calon Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Beberapa misi ekonomi di antara sembilan misi yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor satu ini adalah ‘Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing’ dan ‘Pembangunan yang merata dan berkeadilan’. Masing-masing misi ekonomi memiliki program aksi sebagai berikut:

Tabel 1. Misi Ekonomi Tim Joko Widodo dan Ma’ruf Amin

No.	Misi Ekonomi	Program Aksi
1.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila; • Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur; • Melanjutkan revitalisasi industry dan infrastruktur pendukung untuk menyongsong Revolusi Industri 4.0; • Mengembangkan sector-sektor ekonomi baru; • Mempertajam reformasi struktural dan fiskal; • Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.

<p>2.</p>	<p>Pembangunan yang merata dan berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribusi asset demi pembangunan berkeadilan; • Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM Koperasi; • Mengembangkan ekonomi kerakyatan; • Mengembangkan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial; • Melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di Perdesaan; • Melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan; • Mempercepat penguaran ekonomi keluarga; • Mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antarwilayah.
-----------	--	---

Sumber: Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju (2018)

Misi-misi ekonomi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dilaksanakan pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla periode 2014 - 2019. Pada periode tersebut, Joko Widodo sangat menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural sehingga membuka jalan bagi pelaksanaan misi-misi ekonomi yang telah disebutkan di tabel 1.

VISI MISI EKONOMI PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA UNO

Tim Prabowo Subianto Subianto dan Sandiaga Uno mengusung visi “Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pilar ekonomi tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Misi Ekonomi Tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

No.	Misi Ekonomi
1.	Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan di bidang ekonomi, dengan mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia.
2.	Menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya.
3.	Menjaga harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau.
4.	Mendorong pertumbuhan dunia usaha dan koperasi yang efisien dan unggul.
5.	Mendorong pembangunan berkualitas yang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.
6.	Meningkatkan daya beli masyarakat.
7.	Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, startup, industri syariah dan maritime.
8.	Mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Sumber: Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia (2018)

Secara umum, paslon nomor 02 akan fokus pada isu-isu tertentu. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, Gerindra akan fokus pada tiga isu ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok (Republika, 2018).

Meksipun selama ini Prabowo Subianto belum pernah duduk di lembaga pemerintahan terutama yang berkaitan dengan isu ekonomi, namun hal ini dapat diatasi dengan latar belakang calon wakil presiden yaitu Sandiaga Uno. Beliau adalah pengusaha dan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, Sandiaga memiliki latar belakang sebagai birokrat, meksipun hanya sempat menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun, dan memiliki pengalaman di bidang ekonomi sebagai pelaku usaha puluhan tahun.

PERBANDINGAN MISI EKONOMI ANTAR-PASLON

Tabel 3 memuat misi-misi ekonomi masing-masing paslon sesuai dengan masalah-masalah ekonomi yang akan dihadapi.¹

Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Ekonomi Prabowo Subianto – Sandiaga Uno

No.	Isu	Tim Joko Widodo – Ma’ruf Amin	Tim Prabowo Subianto – Sandiaga Uno
1.	Pertumbuhan ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribusi aset atau reforma agraria dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Selain itu, reforma agraria juga menjadi bagian dari penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kotadesa, pedalaman-pesisir, serta Jawa-luar Jawa;

¹ Sebagai catatan, tidak semua misi ekonomi akan dimasukkan ke dalam Tabel Penulis hanya akan memasukan misi-misi ekonomi yang sekiranya memiliki relevansi langsung dengan masalah ekonomi yang dihadapi.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sektor ekonomi dan produk unggulan yang menciptakan nilai tambah bagi daerah dan warganya; • Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menurunkan kesenjangan ekonomi; • Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai.
2.	Lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat struktur ekonomi menuju kemandirian; • Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri; • Mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun industri hulu dan industri manufaktur nasional berbahan baku isca guna memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, mendorong berkembangnya industri rakyat, serta menyokong penyerapan angkatan kerja; • Menghentikan kebijakan <i>outsourcing</i> yang merugikan pekerja serta mengutamakan tenaga kerja local dibanding tenaga kerja asing dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru.

<p>3.</p>	<p>Stabilisasi harga pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga daya beli melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan swasembada pangan dengan mencetak 2 juta hektar lahan baru bagi peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu • Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen melalui perlindungan dari hulu ke hilir seperti bantuan sarana prasarana, teknologi, pelatihan, hingga ke pemasaran
<p>4.</p>	<p>Indonesia dan perdagangan internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. 	

<p>5.</p>	<p>Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meneruskan/ meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan, dan legalisasi tanah perkebunan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani perkebunan rakyat meningkat; • Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, yang dilakukan dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen, mengembangkan aspek agrobisnis yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan rakyat, melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi propenciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang pro daya beli masyarakat, kebijakan subsidi yang mendorong kemampuan produksi, kebijakan yang menjadikan harga terjangkau dan stabil serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung berkembangnya sektor produktif. • Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kotadesa, pedalaman-pesisir, serta Jawa-luar Jawa.
-----------	------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan inovasi digital farming untuk meningkatkan produktifitas dan sekaligus mendorong minat generasi muda dalam bidang pertanian; • Mendirikan Bank Tani dan Nelayan, serta mengintegrasikannya dengan Fintech (financial technology) untuk mendorong penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pedagang tradisional lainnya; • Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan; • Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen melalui perlindungan Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia 10 dari hulu ke hilir seperti bantuan sarana prasarana, teknologi, pelatihan, hingga ke pemasaran.
--	--	---

6.	Sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”); • Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian yang sesuai karakter demografis dan geografis Indonesia sebagai negeri agraris dan maritim, diantaranya bidang keahlian pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kemaritiman, perindustrian, pariwisata, teknologi informasi, termasuk revitalisasi balai-balai latihan kerja.
----	-------------------	---	--

Sumber: Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju dan Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia (2018)

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka tidak dapat dipungkiri jika pembangunan yang merata merupakan suatu keharusan. Semua daerah harus terbangun untuk memperkuat perekonomian nasional. Dalam hal ini, masing-masing paslon memiliki program aksi yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan isu tersebut, tim Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan mendorong reforma agraria dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antardaerah. Selama ini memang konflik agraria menjadi masalah yang berlarut-larut di Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2017 terdapat 659 konflik agrarian dengan cakupan tanah seluas 520.491,87 hektar. Dari 659 kasus, konflik agrarian yang berkaitan dengan properti mencapai 199 konflik, infrastruktur 94 konflik, pertanian 78 konflik,

kehutanan 30 konflik, pesisir/kelautan 28 konflik, dan pertambangan 22 konflik. Sementara itu, apabila dilihat dari segi komoditas, kelapa sawit merupakan penyebab terbesar konflik agrarian di bidang perkebunan (Kompas, 2017).

Sementara itu, tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menekankan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh industri kerakyatan dan mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah yang cukup tertinggal seperti pulau kecil dan kota-kota pantai dalam rangka menurunkan kesenjangan. Secara umum, memang kesenjangan masih menjadi permasalahan bagi Indonesia, seperti kesenjangan antara Pulau Jawa dengan Pulau Non-Jawa, kota dan desa, Indonesia barat dan Indonesia Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbaru menunjukkan adanya penurunan pada rasio gini nasional dari yang semula 0,391 di bulan September 2017, turun sebesar 0,002 poin menjadi 0,389 pada bulan Maret 2018 (BPS, 2018b). Meskipun ada penurunan, masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang memiliki rasio gini lebih tinggi daripada rasio gini nasional, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (0,441), Sulawesi Tenggara (0,409), Jawa Barat (0,407), Gorontalo (0,403), Sulawesi Selatan (0,397), Papua Barat (0,394), Sulawesi Utara (0,394), dan DKI Jakarta (0,394) (Liputan6.com, 2018a). Tim Prabowo Subianto dan Siandiaga Uno sangat fokus dengan isu kesenjangan ini sehingga banyak program aksi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan di daerah-daerah seperti daerah terpecil, pulau kecil, dan pulau terluar.

Di bidang lapangan pekerjaan, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan berusaha mendorong peningkatan jumlah wirausahawan di Indonesia. Berdasarkan data *The Global Entrepreneurship Index 2018*, Indonesia berada di peringkat 94 dari 137 negara dalam hal kewirausahaan. Peringkat ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura (27) dan Malaysia (58) (The GEDI, 2017). Pertumbuhan wirausahawan di Indonesia memang seringkali terbentur masalah seperti terbatasnya modal dan keterbatasan *platform* yang dapat digunakan oleh para wirausahawan. Padahal, wirausaha memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu dampak positif yang langsung terasa adalah penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya.

Secara keseluruhan, program aksi yang digulirkan oleh paslon nomor 2 terlihat lebih nasionalistik dan sangat berfokus pada masyarakat kecil. Terkait dengan lapangan pekerjaan, paslon nomor 2 menekankan untuk “menghentikan kebijakan *outsourcing* yang merugikan pekerja serta mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru”. Menghilangkan kebijakan *outsourcing* sebenarnya bukan hal yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan *outsourcing* adalah kebijakan internal perusahaan. Apabila kebijakan perusahaan terlalu diatur oleh pemerintah, hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi keinginan investor yang akan melakukan investasi di Indonesia.

Program aksi tersebut diperkirakan merupakan reaksi dari isu tenaga kerja asing di tanah air. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat khawatir dengan isu banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Mereka khawatir jika lapangan pekerjaan di Indonesia akan banyak didominasi oleh tenaga kerja asing. Ditambah lagi, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Maret 2018 (Kompas, 2018b). Aturan ini dibuat untuk lebih memudahkan perizinan tenaga kerja asing. Banyak pihak yang menilai jika aturan ini kurang berpihak pada masyarakat Indonesia yang juga sulit mencari lapangan pekerjaan. Sebagai catatan, berdasarkan hasil penelitian LIPI, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia merupakan konsekuensi dari meningkatnya investasi asing di Indonesia. Terkait dengan hal ini, dikarenakan investasi dari Tiongkok ke Indonesia terus meningkat dari sejak tahun 2010 ke 2016, maka hal ini diikuti oleh peningkatan tenaga kerja dari Tiongkok. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 ke 2016 dari yang semula 873 ke 4.236 (LIPI, 2017).

Stabilisasi harga juga menjadi isu yang menjadi perhatian kedua paslon. Meskipun demikian, pada visi misi tim Joko Widodo – Ma'ruf Amin, kebijakan ekonomi yang lebih detail mengenai bagaimana cara pemerintah akan melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok belum terlihat. Di sisi lain, tim Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memiliki kebijakan yang cukup teknis mengenai cara untuk melakukan stabilisasi harga pangan. Di antaranya adalah mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan pangan dan melindungi produksi mulai dari hulu ke hilir.

Pada isu perdagangan internasional, tim Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memberikan perhatian pada isu tersebut dan mencetuskan program aksi salah satunya dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, beliau sangat mengedepankan diplomasi ekonomi, salah satunya dengan mendorong duta besar-duta besar Indonesia di negara lain untuk mendorong investasi ke Indonesia dan mempromosikan kemudahan berusaha di Indonesia. Cara lain yang dilakukan terkait dengan implementasi diplomasi ekonomi adalah dengan mengadakan pameran dagang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai contoh, pada *Trade Expo Indonesia 2017* di Tangerang Selatan, Indonesia berhasil menghasilkan kesepakatan bisnis dengan Rusia sebesar USD 50 juta dari kopi dan sawit.

Sementara itu, dari *Indonesia-Africa Forum 2018* yang dilaksanakan di Bali pada 10-11 April 2018, Indonesia berhasil menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar USD 1,3 miliar (Liputan 6, 2018b). Upaya ini akan diteruskan apabila Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih pada pemilu 2019. Sementara itu, pada visi misi tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, belum ditemukan adanya kebijakan atau program aksi yang detail mengenai bagaimana Indonesia akan berperan di perdagangan internasional.

Pada isu pertanian, tim Joko Widodo – Ma'ruf Amin menekankan ada penyuluhan pada petani. Paslon nomor 1 ini juga menjanjikan adanya inovasi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Sementara itu, Paslon 2 memberikan perhatian lebih kepada petani. Setidaknya ada enam program aksi di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mulai dari industrialisasi pertanian hingga penjaminan harga pangan. Prabowo memang dikenal dengan pemikirannya yang sangat mengedepankan petani. Beberapa kali ia menekankan bahwa petani adalah ujung tombak ketahanan pangan bangsa. Selain itu, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja cukup banyak sehingga sector ini dianggap perlu terus diperkuat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sekitar 100 juta jiwa atau hampir separuh total penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian (Kementerian Pertanian, 2018). Selain itu, paslon nomor 2 juga berencana akan mendorong *digital farming* dan Bank Tani dan Nelayan.

Terkait dengan sektor pariwisata, tidak dapat dipungkiri, potensi dari sektor pariwisata belum termaksimalkan dengan baik. Pada tahun 2017, sektor pariwisata hanya berkontribusi sekitar 5 persen dari total perekonomian. Pemerintah berencana untuk meningkatkan kontribusi tersebut menjadi 5,25 persen di tahun 2018 dan 5,50 persen di tahun 2019 (PresidenRI.go.id, 2017). Kurang dimaksimalkannya potensi sektor pariwisata ini membuat sektor pariwisata Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Berdasarkan *Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*, Indonesia berada di peringkat 42 dari 136 negara. Peringkat ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Singapura (13), Malaysia (26), dan Thailand (34). Namun demikian, pemerintah saat ini berusaha untuk terus menarik wisatawan asing. Untuk tahun 2018, Kementerian Pariwisata menargetkan agar 17 juta wisatawan asing dapat berkunjung ke Indonesia (CNN Indonesia, 2018b).

Dalam upaya mendorong sektor pariwisata ini, tim Joko Widodo - Ma'ruf Amin akan berencana untuk membangun 10 destinasi baru atau disebut juga dengan "Bali Baru". Pembangunan tempat wisata baru ini penting agar Indonesia dapat menawarkan lebih banyak pilihan tempat wisata. Ditambah lagi dengan potensi sumber-sumber tempat wisata baru yang belum termaksimalkan, maka langkah ini penting untuk dilakukan.

Di sisi lain, tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan berusaha untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja di bidang sektor pariwisata. Keahlian tenaga kerja di bidang pariwisata memang penting untuk ditingkatkan, salah satunya yaitu keahlian berbahasa asing. Berdasarkan hasil *English Proficiency Index 2018*, kemampuan berbahasa Inggris penduduk Indonesia berada di urutan 51 dari 88 negara (EF, 2018). Kenyataan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum mahir berbahasa asing dapat menjadi kendala komunikasi apabila banyak turis asing yang datang ke Indonesia.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MISI EKONOMI CAPRES

Persepsi masyarakat terhadap paslon nomor satu tentu tidak terlepas dari berbagai hal yang dicapai oleh Pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama di bidang ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur ini terbukti mampu meningkatkan popularitas Joko Widodo. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh ISEAS Institute di Singapura, 3/4

masyarakat Indonesia – terutama masyarakat pedesaan – mendukung usaha Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur (The Economist, 2018).

Namun ada pula masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja Joko Widodo. Hasil survey dari Alvira Research Center pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa di antara bidang ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan, tingkat kepuasan masyarakat pada bidang ekonomi adalah yang terendah. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesediaan lapangan pekerjaan hanya 59,8 persen, pengentasan kemiskinan hanya 58,1 persen, dan stabilitas harga pokok hanya 55,7 persen (Kompas, 2018c). Dengan demikian, hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari paslon satu ini.

Survei yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) menunjukkan adanya kelompok-kelompok umur tertentu yang mendukung masing-masing calon presiden. Joko Widodo mendapatkan dukungan dari pemilih berusia di bawah 19 tahun, 30 – 39 tahun, 40 – 49 tahun, serta di atas 50 tahun. Sementara itu, Prabowo mendapatkan dukungan dari kelompok berusia 20 – 29 tahun. Pendukung pada usia ini adalah kelompok yang menganggap bahwa pemerintahan Joko Widodo kurang berhasil dalam membuka lapangan pekerjaan (Bisnis.com, 2017). Melihat hasil survei, kelompok tersebut cukup yakin bahwa misi ekonomi tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mampu memperbanyak lapangan pekerjaan bagi kalangan muda.

KESIMPULAN

Baik tim Joko Widodo – Ma'ruf Amin maupun tim Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memiliki kelebihan dan kekurangan pada misi ekonomi mereka. Secara keseluruhan program-program aksi yang ada sudah memberikan solusi dari beberapa permasalahan ekonomi, seperti isu lapangan pekerjaan dan pertanian. Hal yang lebih penting dari penjabaran berbagai program aksi tersebut adalah implementasi. Apabila salah satu dari mereka terpilih, maka calon presiden dan wakil presiden berikutnya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan berbagai program aksi tersebut. Satu hal yang pasti di bidang ekonomi adalah presiden dan wakil presiden berikutnya haruslah mampu membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com. (2017, 12 September). "Prabowo VS Jokowi: Prabowo Populer di Kalangan Pengangguran, Jokowi Unggul di Pemilih Pemula dan Kelompok Mapan". Diakses dari http://kabar24.bisnis.com/read/20170912/15/689240/prabowo-vs-jokowi-prabowo-populer-di-kalangan-pengangguran-jokowi-unggul-di-pemilih-pemula-dan-kelompok-mapan?fb_comment_id=1268656063240329_1616661098439822.
- BPS. (2018a, 6 Agustus). "Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018 Tumbuh 5,27 Persen". Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/1521/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2018-tumbuh-5-27-persen.html>.
- BPS.(2018b,16Juli). "GiniRatioMaret2018tercatatsebesar0,389".Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.
- CNN Indonesia. (2018a, 13 September). "Pertumbuhan Ekonomi 2018 Diproyeksi Tak Sesuai Target APBN". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180913172703-532-330006/pertumbuhan-ekonomi-2018-diproyeksi-tak-sesuai-target-apbn>.
- CNN Indonesia. (2018b). "Target 17 Juta Turis, kemenpar Bidik Wisatawan Asia Tenggara". Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180924154550-269-332742/target-17-juta-turis-kemenpar-bidik-wisatawan-asia-tenggara>.
- The Economist (2018, 5 May). "Indonesia's leader, Jokowi, is splurging on infrastructure". Diakses dari <https://www.economist.com/asia/2018/05/05/indonesias-leader-jokowi-is-splurging-on-infrastructure>.
- Empat Pilar Menyejahterakan Indonesia. (2018). Dokumen Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2024 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

- English First. (2018). EF EPI: Indeks Kecakapan Bahasa Inggris EF. Diakses dari <https://www.ef.co.id/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v8/ef-epi-2018-indonesian.pdf>
- The Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI). (2017). 2018 Global Entrepreneurship Index. Diakses dari <https://thegedi.org/2018-global-entrepreneurship-index/>.
- Indonesia Investment. (2018, 15 Oktober). "Infrastructure in Indonesia: 13 New Toll Road Projects to Be Completed. Diakses dari [https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/infrastructure-in-indonesia-13-new-toll-road-projects-to-be-completed/](https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/infrastructure-in-indonesia-13-new-toll-road-projects-to-be-completed/item9008) item9008.
- Kementerian Pertanian. (2018, 5 Maret). "Sektor Pertanian Masih Menjadi Kekuatan Ekonomi di Indonesia". Diakses dari <http://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>.
- Kompas. (2018a, 7 Agustus). "Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2018 Tertinggi Sejak 2014". Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/07/102100026/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2018-tertinggi-sejak-2014>.
- Kompas. (2018b, 24 April). "Menyoal Tenaga Kerja Asing dan Dampaknya untuk Indonesia". Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/24/084500726/menyoal-tenaga-kerja-asing-dan-dampaknya-untuk-indonesia>.
- Kompas. (2018c, 23 Februari). "Survei: Bidang Ekonomi Titik Lemah Pemerintahan Jokowi". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/20143871/survei-bidang-ekonomi-titik-lemah-pemerintahan-jokowi>.
- Kompas. (2017, 27 Desember). "659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup lebih dari 500.000 hektar". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercatat-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000>.

- LIPI. (2017, 14 Juli). “Kajian LIPI, Banyak Celah Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia”. Diakses dari <http://lipi.go.id/siaranpress/kajian-lipi-banyak-celah-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/18586>.
- Liputan6.com. (2018a, 16 Juli). “Rasio Gini Turun, Tingkat Ketimpangan di Pedesaan Naik Tipis”. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3590755/rasio-gini-turun-tingkat-ketimpangan-di-pedesaan-naik-tipis>.
- Liputan 6. (2018b, 21 Oktober). “Ini Hasil Diplomasi Ekonomi Ala Jokowi-JK”. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3672549/ini-hasil-diplomasi-ekonomi-ala-jokowi-jk>.
- Meneruskan Perubahan untuk Indonesia Maju. (2018). Dokumen Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2024 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
- PresidenRI.go.id. (2017). “Capaian Sektor Pariwisata 3 Tahun Jokowi-JK”. Diakses dari <http://www.presidentri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/KEMENPAR-Laporan-3-Th-Jkw-JK.pdf>
- Republika. (2018, 15 Agustus). “Gerindra Fokus Tiga Isu Ekonomi pada Kampanye Pilpres 2019”. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/15/pdgss1428-gerindra-fokus-tiga-isu-ekonomi-pada-kampanye-pilpres-2019>.
- World Economic Forum. (2017). The Travel & tourism Competitiveness Report 2017. Jenewa: World Economic Forum. Diakses dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf.

HOAX DAN PERILAKU MASYARAKAT MENJELANG PILPRES DAN PILEG 2019

Zamroni Salim

Peneliti Ekonomi LIPI dan The Habibie Center,

Email: zamronisalim@gmail.com

PENDAHULUAN

Perilaku suatu masyarakat, orang per orang, sangat dipengaruhi oleh teman, lingkungan sekolah/kampus, lingkungan kerja dan lainnya. Namun ada hal lain yang menyangkut hasil karya manusia yang berupa teknologi yang saat ini hadir di tengah-tengah manusia di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Teknologi komunikasi dalam bentuk Hand Phone (HP) atau mobile phone telah banyak mempengaruhi pola perilaku masyarakat Indonesia. Pola komunikasi, cara komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu komunitas atau masyarakat umum telah berbeda dibanding sebelum kehadiran HP ini. Komunikasi antara orang semakin intensif, karena mereka bisa saling menjangkau satu sama lain dengan sangat mudah.

Adakah hal lain yang juga turut hadir mempengaruhi pola hubungan komunikasi manusia saat ini? Jawabnya adalah **Ada**, yaitu kehadiran media sosial (social media) di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan dunia. Perilaku masyarakat juga berubah dengan kehadiran social media. Pertemanan tidak sebatas pada teman kerja, teman sekolah, tapi juga bisa berkelompok dengan orang lain yang mempunyai hobi yang sama, bahkan pandangan politik yang sama terhadap partai politik tertentu, calon legislative tertentu dan Calon Presiden tertentu.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia menjelang pemilu. Faktor-faktor tersebut adalah agama, etnisitas/suku, kelas sosial dalam masyarakat dan kedaerahan (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2018). Dalam masa kampanye, terjadi kecenderungan polarisasi berita yang tidak benar (hoax/fake news). Para pengguna informasi dalam dunia maya cenderung hanya didasarkan pada pengetahuan yang terbatas pada kelompoknya. Dengan demikian, mereka cenderung tidak memperhatikan benar atau tidaknya informasi yang masuk kepadanya (Del Vicario, et all., 2018).

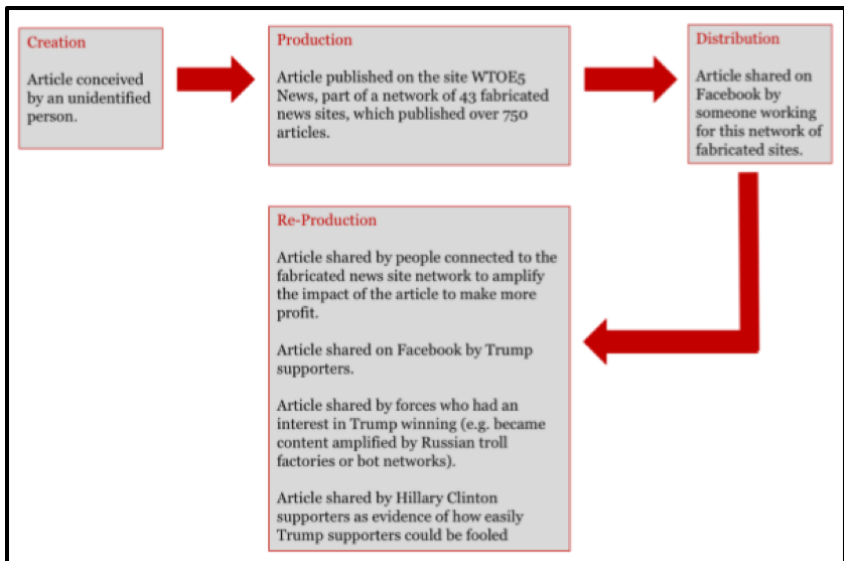
Lalu bagaimana perilaku masyarakat Indonesia dengan bermodalkan teknologi internet, HP dan social media ini berinteraksi antara satu dengan yang lainnya? Bagaimana seharusnya kita bersikap di tahun politik ini, tahun yang mungkin menjadi tahun yang sibuk dengan urusan politik di tengah kesibukan kita bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya?

Di tengah deras nya arus informasi yang sedmikian cepat dan dalam jumlah yang begitu banyak, masyarakat diimbau untuk terlebih dulu mendengar, membaca dengan cermat apa informasi tersebut, dan memahaminya. Bila ingin membagikannya (*sharing*) kepada teman, teman di social media (Facebook, Twitter, Whatsapp dan lainnya) haruslah yakin bahwa informasi atau berita tersebut adalah benar adanya. Mengapa demikian? Kekacauan informasi dengan berbagai bentuknya menjadi penting untuk diperhatikan. Berikut uraian pendek mengenai perilaku masyarakat menjelang Pemilihan Presiden (Piplres)/ Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019 dalam kaitannya dengan arus informasi dan teknologi yang ada.

KEKACAUAN INFORMASI

Suatu informasi bisa salah karena sengaja dibuat salah, atau dibuat sesuai fakta tetapi dimaksudkan untuk merugikan atau menyudutkan seseorang, kelompok, organisasi atau bahkan negara. Secara umum, informasi yang kacau yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang mengandung unsur kepalsuan (*false*) dan merugikan (*harmful*), atau ada semacam kekacauan informasi (*information disorder*) di dalamnya. Kekacauan informasi ini memang sengaja diciptkan oleh pelaku pembuat informasi tersebut (*agent*) dengan tujuan tertentu (Wardle dan Derakhshan, 2017).

Gambar 1. Proses Produksi dan Distribusi Informasi yang Kacau



Sumber: (Wardle dan Derakhshan, 2017).

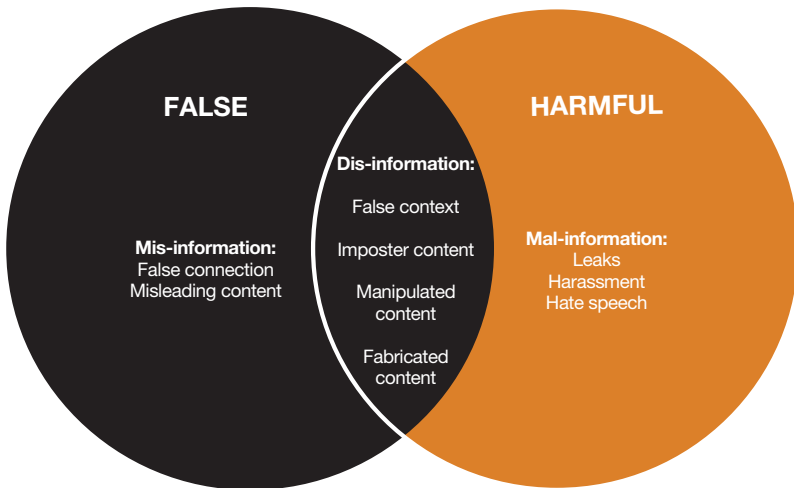
Ada tiga elemen pokok dalam proses pembuatan dan penyebaran informasi yang kacau ini: *pertama* adalah pelakunya/agen, *kedua* adalah pesan (message) dan *ketiga* adalah pihak yang menarasikan lebih lanjut (*interpreter*) (Wardle dan Derakhshan, 2017). Suatu informasi yang tidak benar/kacau/hoax sebenarnya melalui empat tahapan proses, yaitu: pembuatan berita/konten (*creation*), pemuatan oleh media tertentu (*production*) dan proses distribusi melalui social media dan chanel berita lainnya (*distribution*). Plus, adalah terjadi proses reproduksi yang terus berulang dan berlanjut dari satu orang ke orang lainnya secara berantai (*redistribution*).

Pembuat konten (*agent*) bisa berasal dari pendukung salah satu partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Proses produksinya biasanya menggunakan media tertentu yang mempunyai jaringan luas (dimuat di koran online atau cetak). Kemudian, berita palsu tersebut didistribusikan oleh para pendukung kandidat, bahkan bisa juga didistribusikan oleh pihak yang tidak mendukung (karena bermaksud menyerangnya atau menyanggahnya). Sebagai contoh di sini adalah bagaimana informasi palsu atau hoax tersebut digulirkan oleh seseorang tentang: Paus yang mendukung (endorsed) Trump sebagai Presiden. Tentu saja informasi ini menghebohkan banyak orang (dunia), di mana seorang Paus memberikan endorsement pada Trump untuk menjadi Presiden Amerika Serikat dalam Pilpres AS 2016 (Wardle dan Derakhshan, 2017).

Ada tiga bentuk kecacauan informasi (yang bisa menghasilkan 'fake news'): *mis-information*, *dis-information* dan *mal-information* (Wardle dan Derakhshan, 2017). Ketiga jenis kecacauan informasi tersebut sebenarnya di dasarkan pada dua hal, yaitu: statusnya yang palsu (*false*) dan status yang merusak/merugikan (*harmful*).

Mis-information adalah informasi yang palsu tapi dibuat dengan tidak ada maksud untuk merugikan pihak lain. *Dis-information* adalah informasi yang palsu yang sengaja dibuat untuk merugikan seseorang, kelompok social masyarakat, organisasi atau bahkan suatu negara. *Dis-information* ini mengandung dua unsur sekaligus yaitu *false* dan *harmful*. *Dis-information* ini merupakan irisan dari status *false* dan *harmful*. Sementara itu, *Mal-information* adalah informasi yang didasarkan pada fakta/realitas yang ditujukan untuk merugikan seseorang, organisasi atau negara.

Gambar 2. Kekacauan Informasi (*Information Disorder*)



Sumber: (Wardle dan Derakhshan, 2017).

HOAX

Hoax adalah hasil dari kekacauan informasi yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Dulu sebelum era internet, HP dan social media, istilah hoax mungkin belum pernah kita dengar; tetapi sekarang istilah hoax selalu mampir di depan kita di tangan kita (HP) atau di depan mata kita (TV) dan lainnya. Menurut Collinsdictionary (2018), hoax adalah sebuah trik di mana seseorang mengatakan kebohongan kepada orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks adalah berita bohong. Dalam sejarahnya istilah hoax sudah dikenal sebagai hocus sebutan pendek dari *hocus pocus*; sebuah frase yang digunakan oleh tukang sulap di awal abad 17 (Hoaxes.org).

Dalam peta information disorder, hoax masuk dalam kategori dis-information yang mengandung unsur *false* dan *harmful*. Dengan demikian, hoax ini sebenarnya mempunyai sifat merusak (hubungan persaudaraan, pertemanan, persatuan dan kesatuan), karena bisa jadi hoax dibangun

dari fakta tetapi kemudian diplintir; atau dibuat dengan mencampurkan antara suatu fakta dan kepalsuan. Hoax pada awalnya agak sulit dideteksi, karena isinya bisa berupa campuran antara yang baik dan yang benar/fakta dan kepalsuan. Bisa jadi, masyarakat awam cenderung menganggap bahwa hoax tersebut adalah suatu kebenaran.

Hoax merupakan suatu berita atau informasi yang tidak benar (dan cenderung tidak baik untuk disampaikan) karena tidak didasarkan pada data yang valid, data yang benar, dan tidak berdasarkan fakta. Karena sifatnya yang demikian, maka sebenarnya hoax ini adalah musuh bersama, musuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam masa tahun politik ini, penyebaran hoax mempunyai tendensi tertentu untuk tujuan tertentu dan untuk memenangkan calon (Legislatif ataupun Presiden) tertentu. Hoax bisa dibuat oleh siapa saja di tahun politik ini; bisa dibuat oleh kelompok pendukung partai tertentu untuk menyerang pihak lawan; bisa dibuat oleh pendukung capres tertentu untuk menjatuhkan pihak lainnya. Hoax juga bisa diproduksi oleh pihak ketiga yang mempunyai tujuan komersial (alasan ekonomi); bahkan bisa mempunyai agenda terselubung dengan tujuan untuk mengacaukan pesta demokrasi yang akan digelar oleh Bangsa Indonesia.

Apa dampak negative penyebaran hoax?

Seperti halnya fitnah, hoax bisa merusak sendi kehidupan kita bersosial, bertetangga, berteman, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya, dengan adanya hoax tersebut, hubungan pertemanan dan hubungan masyarakat bisa hancur. Demikian juga, efek negatif yang terus berlanjut dari penyebaran hoax ini bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan bisa merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Tentu saja, kita bangsa Indonesia yang dikatakan berbudi luhur, bertatakrama, dan berbudaya harusnya bisa memilah berita atau informasi yang kita terima. Bila yakin bahwa informasi tersebut adalah hoax, maka jangan sekali-kali menyebarkannya.

Kasus rusaknya tata-tatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di sejumlah daerah/negara harusnya bisa menjadi pelajaran buat kita bangsa Indonesia. Hancurnya sejumlah negara di Timur Tengah, juga tidak lepas Hoax dan provokasi. Sebut saja Suriah, Irak,

Libya dan lainnya. Propaganda dan penyebaran hoax untuk tujuan politis yang mengganggu stabilitas, keamanan dan persatuan negara, sangatlah merugikan. Hal ini karena hoax bisa menjauhkan kita dari memilih calon legislative, dan calon pemimpin Indonesia yang baik.

PEMUTARBALIKAN FAKTA

Seperti halnya hoax, pemutarbalikan fakta juga menjadi bagian dari perilaku yang tidak baik dalam kita memasuki tahun politik. Merujuk pendapat Wardle dan Derakhshan (2017), pemutarbalikan fakta merupakan dis-informasi yang informasinya bersifat palsu dan merugikan pihak lain. Dalam dis-informasi ini, bisa jadi ada fakta, tetapi yang terjadi adalah 'fakta' yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan fakta aslinya, karena sudah dimanipulasi oleh agent/pihak pembuat.

Apa bentuk dari pemutarbalikan fakta ini. Berbagai kasus berita yang tersebar (baik berupa video, foto, pesan singkat/messages) sering kali beredar setelah diedit atau disunting sehingga bentuknya tidak utuh. Dengan demikian, ketika berita tersebut disebarakan bisa memberikan persepsi yang keliru kepada pembaca akan arti yang sebenarnya dari berita tersebut. Tentu saja, si penyunting berita tersebut mempunyai tujuan politis tertentu ketika melakukan penyuntingan dan menyebarkannya. Mereka menginginkan suara (*votes*) dari para pendukung militannya, dari pemilik suara yang mengubah pilihan, dan dari pemilik suara yang selama ini belum menentukan pilihan.

SARING SEBELUM SHARING

Saring sebelum *sharing* adalah suatu sikap dan langkah yang bijak dan harus menjadi budaya umum masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Saring sebelum *Sharing* sebenarnya ini harus menjadi budaya bersama, budaya umum, budaya bangsa Indonesia, setiap saat. Namun, secara khusus pada saat pemilihan umum (Pilpres dan Pileg) 2019, arus informasi yang masuk ke dalam diri kita semakin deras, dan informasi yang muncul bisa benar taupun tidak, bisa baik ataupun tidak, bisa berupa hoax atau fakta, bisa juga fakta tetapi sudah dimodifikasi (diplintir). Oleh karena itu, sikap Saring sebelum *Sharing* menjadi hal yang harus diprioritaskan dalam kita berinteraksi dengan pihak lain baik di dunia maya (*on line*) atau di dunia nyata (*off line*).

Sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir, sebenarnya ada tatanan atau aturan tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbudaya, ada yang namanya tata krama, adat istiadat dan lainnya yang mengharuskan kita tidak boleh berbohong, harus berkata yang benar, menyampaikan informasi yang benar dan lainnya. Namun, karena statusnya sebatas tatanan sosial budaya, sangsinya juga berupa sangsi sosial (mungkin sudah tidak berpengaruh, diabaikan oleh masyarakat). Setelah lahirnya UU ITE, setiap tindakan kita dalam berkomunikasi dan bertransaksi secara elektronik mempunyai konsekuensi hukum bagi pelakunya. Konten berita atau tulisan ataupun ucapan/unggahan social media bisa dipidanakan bila memenuhi beberapa unsur seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Konten Negatif

No.	Muatan Konten	Dasar Hukum
1.	Pencemaran nama baik atau fitnah	Pasal 27 (3)
2.	Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen	Pasal 28 (1) UU ITE
3.	Provokasi terkait SARA	Pasal 28 (2) UU ITE

Sumber: HukumOnline.com (2018)

Dalam masa kampanye Pileg dan Pilpres 2019, peluang untuk munculnya konten negative cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat harus waspada untuk mengetahui batas-batas yang diperbolehkan secara hukum dalam mendistribusikan informasi kepada pihak lain. Ada tiga jenis konten hoax yang dapat dijerat pasal pidana penjara antara 4 – 6 tahun berdasarkan UU ITE No 19 tahun 2016 (Tabel 2).

Tabel 2. Konten Hoaks

No.	Kualifikasi Konten Hoaks	Sanksi	Dasar Hukum
1.	Menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat	10 Tahun	Pasal 14 (1)
2.	Menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita itu bohong	3 Tahun	Pasal 14 (2)
3.	Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran	2 Tahun	Pasal 15

Sumber: HukumOnline.com (2018).

Selain itu, sebenarnya penyebar hoaks juga bisa dikenakan tindak pidana dengan menggunakan pasal pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 (Tabel 2) tentang Peraturan Hukum Pidana, seperti yang dijelaskan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting (HukumOnline, 2018). Alasan mengapa pasal dalam UU No. 1/1946 bisa lebih mudah dikenakan kepada penyebar hoaks, karena pasal penyebaran hoaks dalam UU ITE terbatas pada konteks yang menimbulkan kerugian kepada konsumen, meskipun ada juga yang berupa ujaran kebencian dan sara. Hoax dalam UU ITE bisa dikenakan bila ada pihak yang dirugikan (perseorang, kelompok atau korporasi); dan bila tidak ada yang dirugikan akan dianggap sebagai gossip di dunia maya (Kominfo.go.id, 2018).

Saat kita menyebarkan berita atau informasi haruslah memahami apa yang kita dapat dan kita baca (menyaring). Bila yakin bahwa berita tersebut benar maka bisa disebar (sharing). Sebenarnya ada juga kondisi lain yang menentukan kita bisa menyebarkan berita tersebut yaitu sesuatu yang baik. Baik buruk ini mungkin relatif, dalam arti bisa tergantung pada jenis kelamin, umur, golongan, kelompok masyarakat yang berbeda adat istiadatnya, agama, dan lainnya. Jadi menyebarkan sesuatu yang benar dan baik adalah perilaku yang harus dijaga, dan ditularkan kepada teman dekat, teman sekolah, teman kerja dan teman di social media.

Biasakan mencari data atau informasi dari sumber aslinya, dan biasakan membaca berita secara lengkap atau utuh. Jangan hanya membaca judulnya atau bagian depan saja, atau jangan hanya membaca bagian yang sudah dikutip orang saja. Bila berbicara masalah data harga/inflasi/pengangguran cek dulu datanya langsung ke Badan Pusat Statistik (BPS) atau Bank Indonesia (BI) atau lembaga lain yang terkait. Bila mencari data produksi pertanian bisa ke Kementreian Pertanian atau Kementerian lainnya. Bila mencari data perdagangan bisa dari Kementerian Perdagangan. Bila tidak menemukannya secara langsung bisa mencari sumber-sumber dari internet yang berasal dari lembaga yang kompeten, lembaga yang kredible, media yang kompeten dan kredible., bukan lembaga yang abal-abal keberadannya, bukan sumber online yang abal-abal yang hidupnya hanya menjang Pileg/Pileg 2019 dan kegiatan politik lainnya.

CATATAN PENUTUP: MENYIKAPI HOAX

Bagaimana kita menyikapinya bila menemukan suatu berita atau informasi yang masuk ke telinga kita, masuk ke HP kita, masuk ke grup social media kita? Langkah yang harus dilakukan adalah mengecek kebenaran berita tersebut, apakah sesuai dengan fakta atau berita bohong, atau bahkan fitnah semata. Hal ini perlu dilakukan, karena: pertama secara sosial budaya dan keagamaan, kita harus menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Kedua, dari sisi hukum, dengan mengacu pada UU ITE, ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Ketiga, ekses negatif yang bisa muncul dengan adanya hoax, dan kita ikut bertanggung jawab (dengan konsekuensi hukum yang ada) karena kita ikut menyebarkannya. Oleh karena itu, setelah mengetahui berita tersebut adalah hoax, kita harus menghentikannya/tidak menyebarkannya lebih lanjut.

Perilaku kita merupakan tanggungjawab kita yang mempunyai konsekuensi hukum. Keterbukaan informasi menjadikan kita sebagai salah satu target distribusi informasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai macam kepentingannya, baik kepentingan yang sifatnya personal/individu, kelompok, atau atas nama bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam masa Pilpres/Pileg 2019 ini diharapkan kita bisa menyaring informasi yang masuk ke kita, dan mendistribusikannya (*sharing*) kepada pihak lain, bila kita yakin bahwa informasi tersebut benar, baik dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

CollinsDictionary. (2018). <https://www.collinsdictionary.com>

Claire Wardle and Hossein Derakhshan (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary framework for research and policymaking. September 27, 2017. Published by the Council of Europe, October, 2017

Del Vicario, et all. (2018). Polarization and Fake News: Early Warning of Potential Misinformation Targets. arXiv: 1802.01400v1. 5 February 2018

HukumOnline.com (2018). Pasal Berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax>

Kominfo.go.id (2017). Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal. https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat-segudang-pasal/0/sorotan_media. 13 01-2017

Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi. (2018). Voting Behaviour in Indonesia since Democratization: Critical Democrats. Cambridge University Press

ISLAMISME DI KAMPUS DALAM PUSARAN POLITIK IDENTITAS DI PEMILU 2019

Mohammad Hasan Ansori
Direktur Progam dan Riset, The Habibie Center
Email: ansori@habibiecenter.or.id

ISLAMISME DI KAMPUS DAN REKRUITMEN POLITIK

Sebagaimana ditegaskan oleh Kemenristek Dikti, saat ini, jumlah mahasiswa di Indonesia mecapai kurang lebih tujuh juta dan 200,000 dosen, serta ratusan ribu pegawai di pendidikan tinggi (DW, 2018). Perbincangan isu Islamisme di kampus mulai muncul ke permukaan dan menjadi perdebatan public secara umum setelah munculnya berbagai survey-survei terkait dengan isu tersebut, seperti riset PPIM-UIN Jakarta (*Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat*) (2008 and 2010) eksklusivisme keagamaan guru agama Islam (Kirana, 2018), riset Maarif Institute (2015) budaya kekerasan dan radikalisme di kalanga anak muda (Kompas, 2016), riset Alvara Research Center (2017) terkait dengan tingkat Islamsime di kalangan mahasiswa dan pelajar SMA, studi Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), Ministry of Foreign Affairs Malaysia (2018) terkait radikalisme mahasiwa S1, dan studi Achmad Habibullah terkait sikap sosial-keagamaan Rohis (Habibullah, 2014).

Pada dasarnya, sebagaimana ditegaskan oleh Kemenristek Dikti, Islamisme di kampus sudah terjadi sangat lama semenjak 1983, khususnya setelah pemerintah memberlakukan program (*Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan -NKK/BKK*). Implementasi NKK/BKK tersebut yang pada dasarnya melarang setiap kegiatan politik dalam kampus telah menciptakan kevakuman kehidupan kampus yang kemudian diikuti dengan munculnya berbagai kesempatan Islamisme di kampus (CNN Indonesia, 2018). Studi lain menunjukkan bahwa bibit Islamisme di kampus itu sudah ada sejak pasca reformasi karena banyak organisasi Islam transnasional yang masuk ke kampus-kampus (DW, 2018).

Menurut Poljarevic (2015), Islamisme merupakan salah satu konsep sosial-politik yang banyak dan terus-menerus diperdebatkan dalam berbagai literatur keserjanaan. Istilah Islamisme sendiri pada tataran sederhana menunjuk dan/atau merepresentasikan pada berbagai bentuk aktivisme politik dan sosial, yang bersandarkan dan berakar pada sebuah gagasan bahwa kehidupan publik, dengan berbagai bentuknya, baik sosial, budaya, ekonomi dan politik, harus dibangun berdasarkan serangkaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip ke-Islaman. Dengan kata lain, para kelompok dan/atau gerakan Islamis adalah mereka yang meyakini bahwa Islam memiliki peran penting untuk dimainkan dalam kaitannya mengatur dan mengorganisasi suatu masyarakat yang anggotanya mayoritas Muslim dan berusaha dengan berbagai cara, baik dengan kekerasan maupun tidak, untuk merealisasikan keyakinan tersebut.

Perguruan tinggi umum lebih mudah menjadi target perekrutan gerakan-gerakan Islamis, daripada perguruan tinggi berbasis keagamaan yang dianggap lebih sulit. Diasumsikan bahwa mahasiswa perguruan tinggi umum lebih rentan terhadap rekrutment gerakan-gerakan Islamis ini daripada mahasiswa mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Gejala ini jelas berkaitan dengan kenyataan bahwa cara pandang mahasiswa perguruan tinggi umum khususnya bidang sains dan teknologi, cenderung hitam putih. Sedangkan mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang mendapat keragaman perspektif tentang Islam cenderung lebih terbuka dan benuansa (Azra, 2018).

Terdapat beberapa alasan mengapa gerakan gerakan Islamis ini melihat Indonesia dan mahasiswanya sebagai rekrutmen dan dukungan. Pertama, para mahasiswa dilihat sebagai target audiens yang strategis, dan oleh karenanya dengan merekrut mereka, gerakan-gerakan Islamis ini membangun basis untuk mempengaruhi dan merekrut masyarakat

luas, khususnya terkit dengan politik Islam (Suyanto, 2018). Kedua, para mahasiswa dinilai masih dalam proses menjadi (*becoming*), di mana cara berfikirnya masih relatif sederhana dan secara psikologis masih labil (Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), Ministry of Foreign Affairs Malaysia, Undergraduate radicalization in selected countries in Southeast Asia, 2018). Oleh karenanya, mahasiswa S1 ini secara khusus masih dalam proses pendewasaan, baik secara emosional maupun intelektual, yang membuatnya seringkali rentan terhadap idealism-idealisme politik Islam (*Ibid.*).

Secara umum, penting untuk membrdakan beberapa perbedaan gerakan keislaman mahasiswa atau varian Islamisme di kampus Indonesia dan sebaiknya tidak menempatkan mereka ke dalam realitas tunggal dan seragam, khususnya dalam kategori besar radikal, karena pada kenyataannya mereka berbeda, baik dalam dimensi pola pemahaman keagamaan, sikap dan tujuan terkait politik (lihat Grafik 1) (Bamualim, et.al., 2018). Menempatkan mereka semua ke dalam satu realitas tunggal atau wadah besar radikalisme hanya akan menghasilkan pemahaam yang bias dan membingungkan. Fakta-fakta tersebut yang sebenarnya banyak terjadi.

Grafik 1: Kerangka Konseptual Islamisme di Kampus

DIMENSI	Literalis	Intoleran	Anti-system	Revolusioner	Kekerasan	Teror
Konservatisme	√	√	√			
Radikalisme	√	√	√	√		
Extremisme	√	√	√	√	√	
Terorisme	√	√	√	√	√	√

Varian pertama dari Islamisme tersebut, yaitu konservatisme, menjadi perhatian khusus terkait dengan studi ini karena beberapa faktor, khususnya aktivisme mereka yang kuat dalam merekrut kader-kadernya d kampus-kampus umum dan jumlah mereka yang relatif paling besar dibandingkan dengan varian Islamisme lainnya dalam kampus. Jumlah anggota terbesar selanjutnya adalah radikalisme yang secara khusus merujuk pada Hizbut Tahrir Indonesia, meskipun terdapat penetrasi

NII yang dinilai relative kecil sekali. Pada dasarnya, baik radikalisisasi model NII/ISIS atau radikalisisasi ala Hizbut Tahrir Indonesia sudah muncul jauh sebelum anak-anak masuk ke perguruan tinggi (VOA *Indonesia*, 11 Juli 2018). Kelompok ini secara tegas dan terang-terangan mendukung khilafah dan menolak demokrasi. Cara-cara yang dipakai untuk memperjuangkan tujuannya tersebut cenderung menghindari sikap frontal dan kekerasan, dan lebih memilih jalur diskusi terbuka, melalui kajian-kajian tertentu yang mereka adakan di kampus dengan mengundang tokoh-tokoh HTI tertentu (Wawancara dengan Yon Machmudi, salah seorang pengajar Universitas Indonesia, Depok, 6 September 2018, dan dengan Ali wibisono, salah satu staf pengajar Universitas Indonesia, Depok, 9 September 2018).

Varian konservatif di kampus, yang pola keberagaman cenderung skriptual dan puritan (Bamualim, et al., 2018), secara luas lebih dikenal dengan kelompok tarbiyah, rohis atau Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Riset LIPI tahun 2011 cenderung terkait dengan kelompok ini, yang menegaskan bahwa di lima universitas di Indonesia (UGM, UI, IPB, Unair, dan Undip) terdapat peningkatan pemahaman konservatif atau fundamentalisme keagamaan (Kemenristek-Dikti, 2018). Kelompok ini secara umum melihat Islam sebagai ideologi, jalan hidup dan politik. Kelompok ini cenderung terbuka ke publik dengan berbagai kegiatan dakwah secara terbuka di masjid- masjid kampus dengan kegiatan tipikalnya berubah berbagai halaqah dan kajian-kajian keagamaan. Kelompok ini cenderung tergabung ke dalam unit-unit kegiatan resmi dakwah kampus, khususnya .Selain itu, relatif terdapat aspek intoleransi dalam kelompok ini, khususnya terkait dengan perbedaan pemahaman keagamaan dan/atau perbedaan agama dalam kampus, meskipun secara umum cenderung toleran dalam bersikap dengan mahasiswa lain yang memiliki pemahaman keislaman berbeda atau bahkan agama yang berbeda. Pada sisi lain, kelompok-kemlpok mahasiswa non Muslim juga melihat mereka memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan yang terlihat dalam interaksi keseharian atau aktifitas bersama di kampus (Azca, 2013).

Kelompok ini secara umum cenderung tidak menolak Pancasila atau demokrasi, tapi memperjuangkan nilai-nilai dan norma-norma keislaman ke dalam berbagai system tersebut. Pandangan konservatif kelompok ini semakin terlihat pada saat mendiskusikan kebijakn dan isu-isu nasional di Indonesia, seperti LGBT, feminisim, BBM, pasar bebas, dsb. (Wawancara dengan salah satu alumni Universitas Indonesia, Depok, 7 September 2018 dan telepon interview dengan salah satu mahasiswa

Institut Pertanian Bogor, 8 September 2018). Secara umum, kelompok ini menolak terorisme dan berbagai cara kekerasan terkait dengan dakwah Islam (Kirana, 2018). Tidak mengherankan kelompok konservatif ini memiliki aktivisme politik yang kuat di internal kampus, bahkan cenderung sebagai gerakan politik Islam yang aktif dan solid dalam setiap pemilu politik yang diadakan di universitas-universitas, baik pada tingkat kampus maupun fakultas. Sebagai contoh, BEM UI sendiri merupakan hasil mobiliasi masjid UI(Salam UI). Hampir dalam setiap bentuk pemilu mahasiswa di kampus, dimensi politik Islam selalu menonjol. Komposisi persaingannya selalu antara kelompok masjid/konservatif (Politik Islam) vs. non-masjid/konservatif (sekuler) atau antara kelompok hijau (konservatif) vs. merah.

Lebih dari itu, kelompok ini bahkan disinyalir kuat memiliki hubungan ideologis dan politis yang kuat dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Hampir mayoritas informan menegaskan bahwa mereka pernah direkrut atau diajak masuk oleh orang-orang tertentu untuk bergabung dengan PKS (Wawancara dengan salah satu alumni Universitas Indonesia, Jakarta, 7 September 2018 dan telepon interview dengan salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor, 8 September 2018). Tidak hanya sekali, bahkan sebagian mereka mengakui pengalamannya diajak bergabung dengan PKS beberapa kali dan dilakukan secara intensif. Pada sisi lain, PKS sendiri sudah sejak lama diketahui telah secara aktif melakukan rekrutmen kader mereka ke dalam kampus-kampus negeri umum (Berbagai wawancara dengan berbagainarasumber, khususnya dengan Yon Machmudi, salah seorang pengajar Universitas Indonesia, Depok, 6 September 2018, dan dengan Ali wibisono, salah satu staf pengajar Universitas Indonesia, Depok, 9 September 2018). *Bagian dibawah ini secara umum menjelaskan berbagai metode yang pada umumnya digunakan oleh gerakan Islamis untuk melakukan rekrutmen di kampus.*

POLITIK ISLAM DAN REKRUITMEN POLITIK DI KAMPUS

Terdapat berbagai jalur rekrutmen politik Islam dalam kampus ini. Metode pertama dilakukan melalui berbagai acara di kampus, khususnya LDK dan berbagai orientasi kegiatan mahasiswa baru (*The Jakarta Post*, 5 Juni 2018). Dalam kegiatan inilah, kelompok Islam tersebut secara agresif melakukan pendekatan dan rekrutmen terhadap mahasiswa baru, baik dengan menggunakan strategi bertatap muka langsung di depan publik (*public face-to-face*), yaitu dengan memperkenalkan secara formal UKM LDK di hadapan mahasiswa pada saat orientasi di tiap-tiap fakultas,

atau dengan strategi bertatap muka secara pribadi (*private face-to-face*) terhadap beberapa mahasiswa baru dengan memanfaatkan jalur jaringan sosial mereka, khususnya alumni sekolah atau kesamaan daerah asal (Telepon-interview dengan Ari, salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor, 9 September 2018).

Metode yang umumnya digunakan oleh gerakan Islamis ini untuk menjaring mahasiswa baru adalah strategi bertatap muka langsung secara personal (*private face-to-face*) dan padadilakukan pada saat orientasi mahasiswa baru di kampus. Pada saat mahasiswa banyak mengalami kelelahan dan tekanan berat akibat padatnnya kegiatan orintasi tersebut, gerakan Islamis dengan sigap menawarkan semacam konseling dan mentoring keagamaan terhadap mahasiswa baru. Mereka berdalih untuk memberikan dan menawarkan ketenangan dan jalan keluar atas permasalahan yang mereka alami saat ini. Inilah salah satu pintu rekrutmen mahasiswa-mahasiswa baru tersebut. Selain itu, metode yang digunakan adalah dengan menawarkan jasa mencari tempat kos dan kelompok-kelompok belajar bersama. Lewat jasa inilah kemudian gerakan Islamis ini mengajak untuk bergabung. Mereka juga menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan penugasan langsung dari pimpinan atau senior lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian dari kaderisasi (Tempo, 28 Mei-3 Juni 2018). Kelompok ini juga menekankan pentingnya rekrutmen lewat strategi rekrutmen publik melalui berbagai media (*public mediated*) (McAdam dan Snow, 1997), yang berupa penyebaran berbagai pesan-pesan dakwah terhadap mahasiswa lewat media sosial, penyebaran berbagai pamphlet dan spanduk.

Metode lain yang banyak digunakan oleh kelompok Islamis ini adalah dengan mengadakan berbagai bentuk pengajian-pengajian dalam kampus, ada yang menyebutnya liqo', halaqoh, tarbiyah atau taklim. Kajian-kajian keislaman tersebut ada yang berifat bulanan atau mingguan, ada yang diadakan di tingkat fakultas dan tingkat umum (kampus atau nasional) yang biasanya mengambil tempat-tempat di masjid-masjid kampus (wawancara dengan salah satu mahasiswa anggota LDK UI, Depok, 12 September 2018).

Seorang mahasiswa bahkan menegaskan kesaksiannya bahwa selama bergabung dengan kelompok ini, dia dan anggota lain kerap dicekoki ajaran menantang Pancasila dan antidemokrasi dan liberalism, bahkan pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi itu ide sinting dan tidak sesuai ketentuan Allah dan pemerintah Jokowi ini pro Kristen dan China (wawancara dengan salah satu mahasiswa yang bergabung dengan

Hizbut Tahrir Indonesia, Ciputat, 9 September 2018). Pada umumnya, masjid menjadi pusat dakwah kelompok-kelompok Islamis seperti ini. Dengan kata lain, dalam masjid-masjid kampus inilah, kebanyakan proses Islamisasi dilakukan dengan secara monolitik, eksklusif dan indoktriner serta juga menjadi sumber penting kuatnya konservatisme dan radislime politik di Indonesia (PPIM, 2017).

Pada esensinya, metode rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok Islamis ini cenderung bersifat relatif terbuka. Terdapat agen-agen khusus yang ditugaskan untuk merekrut mahasiswa dan sering bergerak pada kegiatan-kegiatan strategis dan tempat-tempat keramaian lainnya (wawancara dengan salah satu alumni Universitas Indonesia, Jakarta, 7 September 2018 dan Ali wibisono, salah satu staf pengajar Universitas Indonesia, Depok, 9 September 2018). Proses rekrutmennya juga pada umumnya berjejaring dengan lokasi-lokasi khusus di luar kampus. Rekrutmen kelompok Islamis ini biasanya diawali dengan identifikasi, profiling dan screening calon target yang ada dalam kampus. Setelah itu, proses selanjutnya pada umumnya diarahkan menuju *base-camp* mereka yang sering terletak di luar kampus. Di sinilah diskusi dan proses rekrutmen serta kaderisasi terjadi (disarikan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber).

ISLAMISME DI KAMPUS, POLITIK IDENTITAS DAN TANTANGAN PEMILU 2019

Gerakan Islamisme di kampus, yang pada umumnya mengambil bentuk dua model besar dengan berbagai variannya, yaitu konservatisme dan radikalisme, telah tumbuh lama sejak tahun 1980-an setelah penerbitan NKK/BKK dan secara khusus pasca reformasi Indonesia tahun 1998, yang telah membawahkan dampak terbuaknya keran kebebasan berserikat dan berpendapat. Gerakan Islamisme/konservatisme di kampus ini mengambil bentuk dominan dalam politik identitas, baik dalam berbagai kegiatan dan pemilu di kampus maupun keterkaitan ideologis yang kuat dengan partai-partai Islam tertentu, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada sisi lain, PKS sendiri sudah sangat lama melebarkan rekrutmen politik dan kaderisasinya ke dalam universitas-universitas negeri umum (Mahmudi, 2006). Salah seorang responden, misalnya, menegaskan kesaksiannya bahwa dirinya pada tahun 2005 sudah seringkali diajak untuk bergabung dengan PKS dan begitu juga dengan teman-temannya pada saat kuliah di Universitas Indonesia. Ajakan tersebut bahkan dilakukan secara intens dan secara khusus pada saat terdapat acara-acara dakwah atau keagamaan di kampus (wawancara

dengan Ali Wibisono, salah satu staf pengajar Universitas Indonesia, Depok, 9 September 2018).

Tantangannya adalah gerakan Islamis dan politik identitas tersebut semakin menguat dan, bahkan dalam tahap tertentu membuat khawatir beberapa mahasiswa non-Muslim di kampus, pasca gerakan anti Ahok atau yang jamak dikenal dengan Gerakan 212 atau Aksi Bela Islam. Gerakan tersebut tumbuh pada awal-awala tahun 2016 sebagai bagian mobilisasi gerakan oleh FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan ormas Islam lainnya yang mengutuk keras terhadap pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) terkait dengan Surat *Al-Maidah* ayat 51. Gerakan tersebut muncul dengan jilid keduanya yang relatif cukup besar dan lebih dikenal dengan Aksi Damai 411.

Secara sepintas dapat digambarkan bahwa proses awal terjadinya berbagai aksi bela Islam atau Anti-Ahok adalah bagian dari bentuk protes yang dilakukan masyarakat Muslim Indonesia terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta tersebut terkait surat *Al-Maidah* ayat 51 di Kepulauan Seribu, yang menegaskan bahwa “jangan percaya sama orang, kan bisa dalam hati kecil bapak/ibu gak bisa pilih saya “ya kali dibohongi pakai surat *Al-Maidah* ayat 51 macem-macem itu”. Itu hak Bapak/Ibu, jadi kalau bapak/ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, tidak apa-apa. Karena ini panggilan hati pribadi Bapak/Ibu, biarkan program ini jalan saja. Jadi bapak/ibu tidak usah merasa tidak enak dalam nuraninya tidak pilih Ahok dan tidak suka sama Ahok” (lihat Youtube, “Pernyataan lengkap Ahok saat sebut Surat *Al-Maidah* Ayat 51). Bagi kelompok Islam tertentu, dan dengan domotori oleh GNPf-MUI (Gerakan Nasional Penjaga Fatwa MUI), pernyataan Ahok tersebut dinilai telah menistakan agama Islam.

Berbagai gerakan bela Islam tersebut pada kenyataannya telah membawa dampak yang cukup luas, baik sosial-keagamaan maupun politik secara nasional. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) (24 September 2018), misalnya, mengaskan bahwa aksi 212 justru membuka keran naiknya intoleransi di Indonesia. Secara lebih detail, data tersebut merupakan hasil survei LSI tahun 2018 yang dikomparasikan dengan tahun 2016 dan 2017. Hasilnya secara kuat menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan intoleransi politik pasca-demo anti Ahok. Secara rinci, dari simulasi pertanyaan kepada responden muslim yang keberatan atau tidak jika orang non-muslim menjadi presiden, sebanyak 59 persen responden menjawab keberatan. Angka tersebut meningkat

dibandingkan 2016 dan 2017, yaitu 48 dan 53 persen keberatan non muslim jadi presiden. Selain itu, responden Muslim yang keberatan jika non-muslim jadi wakil presiden berjumlah 55 persen. Padahal Pada data 2016 dan 2017, mereka hanya berjumlah sebanyak 41 dan 50 persen responden muslim keberatan non-muslim menjadi wakil presiden. Terakhir, responden muslim yang keberatan non muslim menjadi gubernur berjumlah 52 persen di 2018. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan 2016 dan 2017, yaitu 40 dan 48 persen (*Tempo.co*, 24 September 2018). Kondisi ini tentunya mangkhawatirkan menginta studi Setara Institut menunjukkan bahwa intoleransi adalah sumber terorisme (*Geotimes.co.id*, 19 Januari 2016).

Pada kenyataannya gerakan Islamis anti-Ahok ini sudah secara kuat masuk ke dalam kampus-kampus. Banyak civitas akademika kampus yang terlibat dengan gerakan Islamis ini. Banyak diketahui, misalnya sebagaimana kesaksian salah seorang responden, jika Universitas Indonesia banyak dikaitkan dengan dan digunakan oleh Gerakan 212 pada momen-momen tersebut. Hanya saja, rektor Universitas Indonesia tidak pernah mengambil sikap terkait dengan politik identitas tersebut yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan Islamis ini (wawancara dengan salah seorang pengajar di Iniversitas Indonesia, Depok, 8 September 2018).

Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kampus-kampus negeri umum dalam gerakan-gerakan Islamis tersebut yang mengarah pada penguatan politik identitas tidak dapat dipahami dengan baik jika merujuk pada menguatnya Islamisme, khususnya konservatisme, di berbagai kampus-kampus negeri umum pasca reformasi. Kondisi tersebut seperti gayung bersambut. Pada sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri yang sudah cukup lama melakukan rekrutmen politik dan kaderisasinya di berbagi kampus negeri umum merupakan salah satu penopang kuat gerakan Islamis anti-Ahok tersebut.

Penetrasi gerakan-gerakan Islamis Anti-Ahok tersebut ke dalam kampus-kampus negeri umum dapat terlihat munculnya berbagai sepanduk dan selebaran di sekitar kampus. Sebagai contoh, di sekitar kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), terdapat selebaran di kalangan mahasiswa yang berisikan kalimat-kalimat, “jangan berteman dengan non-Muslim”. Terdapat juga beberapa bener di sekitar kampus yang bertuliskan, misalnya, “jangan memilih pemimpin non-Muslim” (telepon-interview dengan Raya, salah satu mahasiswa non-Muslim Institut Pertanian Bogor, 9 September 2018). Kondisi ini menunjukkan bukan

hanya menguatnya dinamika politik Islam dan politik identitas saat ini tetapi juga kenyataan keterkaitan antara politik identitas dan ke-Islaman tersebut di kampus-kampus negeri umum yang memang konservatisme sudah relatif lama berkembang.

Menguatnya politik identitas dan gerakan-gerakan Islamis Anti-Ahok ini telah membawahkan dampak secara umum terkait hubungan mayoritas dan minoritas dan secara khusus hubungan Islam-Kristen di kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa non-Muslim, misalnya, menceritakan kesaksiannya bahwa mereka merasa khawatir saat menguatnya kasus Ahok meskipun mencoba untuk tidak memikirkannya. Dalam percakapan sehari-hari, misalnya, jika itu mengarah pada persoalan agama atau isu terkait dengan Ahok, mereka cenderung untuk mengalah atau mengalihkan pada isu-isu lainnya. Mereka berfikir bahwa mahasiswa-mahasiswa Muslim konservatif tersebut juga tidak akan pernah mau mengalah. Dalam beberapa kasus, selebaran-selebaran pelarangan mengucapkan selamat natal juga terdapat di mana-mana (wawancara dengan Leidya, salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, Depok, 6 September 2018 dan Raya, salah satu mahasiswa non-Muslim Institut Pertanian Bogor, 9 September 2018).

Salah satu tantangan terbesar pelaksanaan pemilu 2019 adalah menguatnya politik identitas ini, di samping pelaksanaannya yang akan dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif dan, oleh karenanya, menjadi yang pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa komposisi dua kandidat pemilihan presiden 2019, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amien (nomor urut 1) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (nomor urut 2), beserta basis dukungan politiknya secara umum merupakan kristalisasi dan/atau perpanjangan tensi antara kelompok-kelompok Islamis anti-Ahok dan kelompok-kelompok pro-Ahok. Kondisi tersebut memang tidak dapat menafikan kenyataan bahwa Ma'ruf Amien sendiri merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa MUI terkait penistaan surat Al-Maidah ayat 51 oleh Ahok dan yang kemudian menjadi dasar dibentuknya GNPF-MUI sebagai salah satu aktor utama gerakan tersebut. Sekali lagi, pemilu 2019 nanti bukan hanya akan merupakan pertarungan ulang antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, tetapi juga akan menjadi representasi pertarungan gerakan Islamis anti-Ahok dengan pro-Ahok dengan muara kuatnya politik identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, B., (2018, 25 Mei). “BNPT: kedokteran dan eksakta di 7 PTN terpapar perguruan tinggi, “ *CNN Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525210629-12-301431/bnpt-kedokteran-dan-eksakta-di-7-ptn-terpapar-radikalisme>>, pada 2 Oktober 2018.
- Alvara Research Center, (2018). *Radicalism rising among educated people?: research findings on professionals, college and high school students*.
- Azca, M.N., (2013). “Yang muda, yang radikal: refleksi sosiologis terhadap fenomena radikalisme kaum muda Muslim di Indonesia pasca Orde Baru”, dalam *Jurnal Ma’arif* 8, no. 1, 14-44.
- Azra, A., (2018, 20 Juni). *melindungi perguruan tinggi*, diakses dari <<https://www.uinjkt.ac.id/id/melindungi-perguruan-tinggi>>, pada 12 September 2018.
- Bamualim, C.S. et al. (eds.) (2018). *Kaum muda Muslim milenial: konservatisme, hibridasi identitas, dan tantangan radikalisme*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRSC), UIN Jakarta
- DW, (2018, 11 Juni). *Why is radicalism growing among Indonesian students*, diakses dari <<https://www.dw.com/en/why-is-radicalism-growing-among-indonesian-students/a-44159778>>, pada 13 Oktober 2018.
- DW, (2018, 4 Juni). “Bagaimana menghadapi paham terorisme di kampus”, diakses dari <<https://www.dw.com/id/bagaimana-menghadapi-penyebaran-paham-terorisme-di-kampus/a-44064490>>, pada 12 Oktober 2018.
- Habibullah, A., (2014). “Sikap sosial-keagamaan Rohis di SMA pada delapan kota di Indonesia, dalam” *Jurnal Edukasi*, Vol. 12, Nomor 3, 2014.

- Hidayat, R., (2016, 19 Januari). "Setara Institut: intoleransi adalah sumber terorisme, " *Geotimes.co.id*, diakses dari <<https://geotimes.co.id/berita/setara-institute-intoleransi-adalah-sumber-terorisme/>>, pada 3 Oktober 2018.
- Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti), (2018, 25 Juni). "Kemenristek dikti sinergikan upaya penangkalan paham radikalisme di perguruan tinggi, diakses dari <<https://ristekdikti.go.id/siaran-pers/kemenristekdikti-sinergikan-upaya-penangkalan-paham-radikalisme-di-perguruan-tinggi/>>, pada 12 September 2018.
- Kirana, K., (2018). "Enhancing the role of religious education: an attempt to counter violent extremism in Indonesia, " *Studia Islamika*, Vol. 25, No. 1, 199-206. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta.
- Kuwado, F.J., (2016, 2 Maret). "Survei Maarif Institut: benih radikalisme di kalangan remaja menkhawatirkan", *Kompas.com* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/02/08065991/Survei.Maarif.Institute.Benih.Radikalisme.di.Kalangan.Remaja.Mengkhawatirkan>, pada 13 Oktober 2018.
- Mahmudi, Y., (2006). *Islamizing Indonesia: the rise of Jemaah Islamiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*, Disertasi, Australian National University.
- McAdam, D. & Snow, D.A. (eds.), (1997). *Social Movement: readings on their emergence, mobilization and dynamics*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
- Poljarevic, E. (2015). "Islamism". Dalam Emad El-Din Shahin. *The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), (2017). *Api dalam sekam: keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasioanl tentang keberagamaan di sekolah dan universitas di Indonesia*, diakses dari <<file:///F:/USAID%20CEGAH/RADIKALSIME%20DI%20KALANGAN%20MAHASIWA%20DI%20BANYUMAS.pdf>>, pada 2 Oktober 2018.

- Rochman, A., (2018, 5 Juni). "Guidelines to prevent spread of radicalism on campus needed: rector," *The Jakarta Post*, diakses dari <<http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/05/guidelines-to-prevent-spread-of-radicalism-on-campus-needed-rector.html>>, pada 21 Oktober 2018.
- Suyanto, B., (2018, 5 Juni). "Mewaspadaikan radikalisme yang menyusup ke mapus", *MediaIndonesia.com*, diakses dari <<http://mediaindonesia.com/read/detail/164438-mewaspadaikan-radikalisme-yang-menyusup-ke-wilayah-kampus>>, pada 3 Oktober 2018.
- Tempo, Investigasi paham radikal di kampus kita, 28 Mei-3 Juni 2018.
- Tempo.co., (2018, 24 September). "Intoleransi naik setelah demo anti-Ahok digelar", diakses dari <<https://nasional.tempo.co/read/1129676/survei-lsi-intoleransi-naik-setelah-demo-anti-ahok-digelar/full&view=ok>>, pada 3 Oktober 2018.
- Thomas Koruth Samuel Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), Ministry of Foreign Affairs Malaysia, (2018). *Undergraduate radicalization in selected countries in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: The Southeast Asia Center for Counter-Terrorism.
- Wardah, F., (2018, 11 Juli). "Cegah radikalisme, petinggi kampus diminta awasi mahasiswa," *VOA Indonesia*, diakses dari <<https://www.voaindonesia.com/a/cegah-radikalisme-petinggi-kampus-diminta-aktif-awasi-mahasiswa/4476747.html>>, pada 1 Oktober 2018.
- Youtube, "Pernyataan lengkap Ahok saat sebut Surat Al-Maidah Ayat 51," <<https://www.youtube.com/watch?v=MNdJv3ZAqQE&t=16s>> (12 September 2018).

PERSEPSI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PANDANGAN DAN REKAM JEJAK HAM CALON PRESIDEN 2019

Wirya Adiwena, Vierna Tasya Wensatama
Peneliti The Habibie Center,
Email: wirya.adiwena@habibiecenter.or.id,
vierna@habibiecenter.or.id

Pada bulan April 2019, masyarakat Indonesia akan kembali berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Musim kampanye sudah kembali dimulai, dan janji-janji di berbagai bidang kembali disampaikan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden. Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) cukup sering menjadi salah satu bidang yang menjadi fokus janji para calon tersebut. Dua dekade sejak Reformasi membuka deras keran penegakan dan perlindungan HAM, konsep tersebut memang menjadi semakin akrab dalam diskursus politik ekonomi di Indonesia. Kecenderungan ini menarik, mengingat isu HAM sendiri tidak terhitung penting di mata publik, setidaknya dalam konteks Pemilu – sebagaimana pada bulan Mei 2018, lembaga survei Indo Barometer sempat memprediksi bahwa isu HAM tidak akan banyak mempengaruhi perolehan suara kontestan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 (Tirto.id, 2018a).

Mencuatnya isu HAM dalam Pilpres mungkin tidak dapat dipisahkan dari munculnya aktor-aktor masyarakat sipil yang menjadi semakin aktif mengemukakan isu HAM ke publik. Dalam perjuangannya, mereka senantiasa mencatat dan mengulas rekam jejak pemimpin dalam sektor HAM, serta menyampaikan hasilnya secara luas dan terbuka, untuk dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas isu HAM melalui kacamata masyarakat sipil terhadap pandangan dan rekam jejak HAM calon presiden 2019.

Dalam konteks tulisan ini, patut dicatat bahwa dua calon presiden yang ada untuk Pilpres 2019 – Joko Widodo dan Prabowo Subianto – tentu memiliki catatan yang berbeda. Di satu sisi, Joko Widodo (Jokowi) adalah petahana sehingga terdapat banyak catatan dan evaluasi yang melihat rekam jejaknya sebagai presiden selama empat tahun ke belakang. Sementara itu, walau Prabowo Subianto bukanlah pejabat publik aktif, ia pernah menjabat sebagai perwira militer, sehingga rekam jejaknya semasa menjabatlah yang kerap kali menjadi sorotan oleh masyarakat sipil.

CATATAN HAM JOKO WIDODO

Dalam kapasitasnya sebagai petahana, Presiden Jokowi sudah tidak asing dengan konsep HAM, yang telah beberapa kali muncul dalam dokumen visi, misi, dan program aksi yang menjadi landasan kampanye presidensial 2014 pasangan Jokowi – Jusuf Kalla. Dalam dokumen berjudul “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian” tersebut, misalnya, ditegaskan bahwa konsep ini penting karena “wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada warganegara [...] membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial” (Widodo, 2014).

Lebih lanjut, visi misi tersebut juga menjabarkan kedudukan HAM dalam kehidupan bermasyarakat melalui, “[b]angsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun” baik di dalam maupun di luar negeri (Widodo, 2014). Untuk mewujudkan hal ini, negara harus hadir untuk mewujudkan beberapa visi, antara lain “mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera” (Widodo, 2014). Hal ini diwujudkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2015 – 2019 yang

kemudian mendapatkan revisi menjadi RAN HAM 2018 – 2019. Fokus kepada kehadiran negara ini menempatkan hak sebagai sesuatu yang masih sepenuhnya berada dalam otoritas negara.

Di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun rapor kinerja HAM pemerintahan mereka berdasarkan janji selama kampanye serta RAN HAM. KontraS menyatakan dalam judul laporan tersebut bahwa “HAM bukan prioritas” bagi pemerintahan Jokowi (KontraS, 2018). Menurut KontraS, tidak ada satupun komitmen pemerintahan Jokowi yang sepenuhnya berhasil dipenuhi. Lengkapnya, 11 dari 17 program prioritas HAM yang disebutkan dalam visi misi Jokowi – JK telah sebagian dipenuhi sementara 6 komitmen gagal dipenuhi.

Lebih lanjut, KontraS menganggap bahwa RAN HAM tidak memiliki target yang cenderung minimalis sehingga mudah dicapai. KontraS juga menyatakan bahwa 46 target RAN HAM tidak jelas keberhasilannya, sementara ada empat target yang gagal tercapai (KontraS, 2018). Patut dicatat bahwa KontraS menerapkan standar yang cukup tinggi dalam menilai keberhasilan perlindungan HAM pemerintahan Jokowi-JK. Dalam beberapa hal, saat pemerintah sudah melakukan tindakan atau upaya perlindungan HAM belum tentu dinilai cukup sebagai pemenuhan janji perlindungan HAM sepenuhnya, jika tindakan itu tidak berhasil menuntaskan akar permasalahan (contoh: Janji 2, 9, 10, 11, 17), atau jika upaya itu tidak menempatkan isu HAM sebagai fokus dan masih mendorong perspektif lain seperti ekonomi dan keamanan (contoh: Janji 14).

Tabel 1. Pemenuhan Janji HAM Pemerintahan Jokowi

Pemenuhan Janji HAM Jokowi - JK		
1.	Membangun Politik Legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum	Terpenuhi sebagian
2.	Menegakkan Hukum lingkungan secara konsekwen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini.	Terpenuhi sebagian
3.	Menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa Negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.	Terpenuhi sebagian
4.	Kami berkomitmen agar setiap warga Negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak.	Terpenuhi sebagian
5.	Kami akan mendorong <i>land reform</i> untuk memperjelas kepemilikan dan kemanfaatan tanah dan sumber daya alam melalui penyempurnaan terhadap UU Pokok Agraria.	Terpenuhi sebagian
6.	Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok termarjinalkan.	Terpenuhi sebagian
7.	Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan termasuk perempuan, anak, masyarakat adat dan penyandang disabilitas.	Terpenuhi sebagian
8.	Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.	Terpenuhi sebagian
9.	Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak.	Terpenuhi sebagian

10.	Menjamin pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perburuhan dan hak masyarakat adat melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik.	Terpenuhi sebagian
11.	Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, maupun di dalam kurikulum pendidikan aparat Negara seperti TNI dan POLRI.	Terpenuhi sebagian
12.	Menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.	Tidak terpenuhi
13.	Menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM.	Tidak terpenuhi
14.	Memerjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan Negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN Charter.	Terpenuhi sebagian
15.	Menekan tindak pidana dan mengurangi <i>overcrowding</i> pada Lapas dengan mengembangkan alternatif pemidanaan.	Tidak terpenuhi
16.	Kami berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan, serta akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa.	Tidak terpenuhi
17.	Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.	Tidak terpenuhi
18.	Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak.	Terpenuhi sebagian

Sumber: KontraS (2018)

Catatan KontraS terhadap Jokowi di ujung masa pemerintahannya senada dengan kritik yang dilayangkan oleh Setara Institute dalam evaluasi kinerja HAM Jokowi setelah dua tahun menjabat. Pada bulan November hingga Desember 2016, Setara Institute melakukan survei berbasis web dengan metode purposive sampling, yang menyoroti pihak-pihak yang bekerja di bidang HAM di Indonesia dengan latar belakang akademisi, peneliti, aktivis, tokoh masyarakat, dan pengacara. Survei tersebut mengukur delapan variabel, yaitu: penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; kebebasan berekspresi dan berserikat; kebebasan beragama/berkeyakinan; hak rasa aman warga dan perlindungan warga negara; penghapusan hukuman mati; penghapusan diskriminasi; hak atas ekonomi, sosial dan budaya; serta RAN HAM dan kinerja Lembaga HAM.

Dalam hasil survey tersebut yang dirilis pada 12 Desember 2016, Setara Institute menemukan bahwa persepsi masyarakat sipil atas kinerja HAM Jokowi tidak menunjukkan kenaikan secara signifikan selama masa pemerintahannya di bidang-bidang terkait. Menurut mereka, janji pemerintah di bidang HAM juga masih belum terpenuhi. Setara Institute juga menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi juga “nyaris tidak punya sikap dan roadmap bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara”, sementara dokumen HAM pemerintah yang ada seperti RAN HAM “hanyalah dokumen perencanaan sebagai dasar untuk memperoleh anggaran tanpa mampu melimpahkan keadilan bagi warga” (Setara Institute, 2016).

Salah satu kasus yang kerap dan masih menjadi sorotan masyarakat sipil di Indonesia adalah kasus Novel Baswedan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini diserang oleh beberapa orang tak dikenal di dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada April 2017. Serangan yang membutuhkan sebelah matanya tersebut hingga saat ini belum tuntas diusut dan pelaku penyerangan pun belum dibuktikan, meskipun pihak Kepolisian menyatakan bahwa mereka telah berusaha maksimal untuk menuntaskan kasus ini dengan memeriksa ratusan saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk beberapa rekaman CCTV yang telah menghasilkan sketsa dugaan wajah pelaku (Liputan 6, 2018).

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang terdiri dari beberapa LSM terkemuka seperti YLBHI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LBH Jakarta, Indonesia Corruption Watch, KontraS, dan LBH Pers menyatakan bahwa kinerja Polri masih belum maksimal jika dibandingkan dengan keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus rumit dengan bekal bukti serupa di masa lalu. Mereka mendorong dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen oleh Presiden Jokowi karena merasa Polri tidak serius dalam menangani kasus ini.

Kasus Novel Baswedan ini kembali menjadi sorotan dalam evaluasi kinerja HAM pemerintahan Jokowi oleh KontraS (Republika, 2018). Jika dilihat dari perspektif HAM kasus Novel memang dapat dihitung sebagai pelanggaran HAM atas dasar beberapa hal. Pertama, jika serangan terhadap Novel memang memiliki motif menghalangi kinerjanya di KPK, maka hal ini terkait erat dengan isu pemberantasan korupsi. Sementara itu, isu korupsi sendiri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM di Indonesia, seperti pernah disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahwa “korupsi disebut pelanggaran HAM berat karena mencuri dana pembangunan” (ANTARA News, 2013). Kedua, jika memang ada upaya untuk menghalangi pengusutan kasus Novel oleh pihak Polri, maka negara terhitung abai dalam melindungi—kalau bukannya sengaja untuk tidak melindungi—salah satu warganya yang notabene bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, pengabaian negara sebagai salah satu aktor penting perlindungan HAM termasuk pelanggaran HAM.

CATATAN HAM PRABOWO SUBIANTO

Dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu bukanlah berita yang baru, namun cenderung lebih sering mencuat pada tiap tahun politik di mana ia menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, nama Prabowo tercatat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus penculikan aktivis pada 1997-1998. Keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan tersebut dinyatakan melalui dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang telah dituntut keterbukaannya oleh KontraS, Imparsial, dan Setara Institute (KontraS, 2013). Dokumen ini dikatakan mencatat bahwa Prabowo –

pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komando Pasukan Khusus (Kopassus) – memerintahkan penculikan terhadap 23 orang aktivis. Sebanyak 13 aktivis tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, sementara satu orang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan sembilan orang selamat – termasuk Andi Arief, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang saat ini merupakan bagian dari koalisi untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Uno. Hingga kini, Prabowo belum menjalani persidangan untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM berat tersebut, meskipun pemerintah telah terus menerus menerima tekanan dari berbagai pihak. Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan oleh Panitia Khusus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 (DPR RI, 2009), salah satunya untuk membentuk pengadilan ad hoc guna mengadili kasus tersebut. Poin rekomendasi ini telah lama dan berulang kali dituntut oleh masyarakat sipil untuk segera dilakukan, namun realisasinya belum terlihat hingga rekomendasi ini genap berusia 8 tahun pada tanggal 28 September 2018.

Belum dijalankannya berbagai rekomendasi DPR RI tersebut dan belum ditindaklanjutinya dugaan terhadap Prabowo, menurut KontraS, merupakan tanggung jawab pemerintah yang belum dipenuhi pada era Jokowi. KontraS berpendapat bahwa belum diadilinya dugaan keterlibatan Prabowo salah satunya disebabkan oleh faktor impunitas atau kekebalan terhadap hukum yang dirasa masih kuat di Indonesia. Dalam menanggapi partisipasi Prabowo sebagai salah satu calon presiden di Pilpres 2019, KontraS menyatakan bahwa para keluarga korban pelanggaran HAM berat mengaku kecewa dengan kembalinya Prabowo di bursa capres, juga dengan “sistem yang memungkinkan orang yang memiliki catatan buruk pelanggaran HAM masih bisa menikmati privileginya dan kenikmatan dalam bidang politik” (Tempo, 2018a).

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM telah aktif menyuarakan keresahan masyarakat yang ingin dugaan terhadap Prabowo segera menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Pada Pilpres 2014, sebanyak 23 LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang menurut mereka pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka meminta

masyarakat untuk tidak melupakan peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998 dan dugaan keterlibatan Prabowo di dalamnya (Kompas, 2014).

Hingga saat ini koalisi tersebut belum terdengar kembali gaung kerasnya dalam menyambut Pilpres 2019, terutama dalam menanggapi kembalinya Prabowo ke bursa calon presiden. Imbauan koalisi ini sebenarnya dapat dikatakan masih 'berlaku' untuk masyarakat, mengingat belum adanya kemajuan berarti dalam penindakan lanjutan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang ditujukan pada Prabowo. Namun dormansi koalisi ini dalam menyuarakan imbauan tersebut pada tahun politik ini merupakan suatu kesempatan yang belum dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap mempertimbangkan aspek HAM dalam menentukan pilihan di Pilpres 2019 mendatang.

Seolah belum cukup diuji dengan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, Prabowo kembali diterjang dengan dugaan baru. Pada bulan Agustus 2018, Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan anggota Kopassus TNI Angkatan Darat. Dugaan pelanggaran HAM berat ini terjadi selama pelaksanaan Operasi Jaring Merah di Pidie, Aceh, sepanjang tahun 1989-1998, atau dikenal dengan istilah Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya. Peristiwa ini terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989 hingga 1998. Setelah melakukan penyelidikan mendalam atas 65 orang saksi selama enam bulan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa dalam peristiwa Rumoh Geudong, terdapat lima unsur bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu berupa 'perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang'. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Komnas HAM menemukan oknum yang diduga bertanggung jawab yaitu Kopassus dan pihak lain yang membantu mereka, seperti Komandan dan anggota Kopassus, Komandan dan anggota Baret Hijau dengan logo Gajah Putih, serta Komandan dan anggota Brimob. Menanggapi penemuan ini, KontraS dan Imparsial kemudian

mendukung sejumlah sosok, termasuk Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, untuk diperiksa (Imparsial, 2018). Imparsial menilai bahwa keterangan Prabowo sangat dibutuhkan dalam menindaklanjuti dugaan ini, mengingat kekerasan di Rumoh Geudong diduga dilakukan oleh oknum Kopassus yang saat itu tergabung dalam operasi jaringan merah sehingga perlu ada keterangan lebih jelas mengenai dugaan keterlibatan Prabowo sebagai Komandan Jenderal Kopassus periode 1995-1998 dalam peristiwa Rumoh Geudong, dan saat itu Prabowo adalah pihak yang menyampaikan bahwa Darurat Operasi Militer harus dilaksanakan di Aceh (Tirto.id, 2018b). Terlebih lagi, kelima unsur bukti permulaan tersebut di atas merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer sejak 1989 hingga 1998 (Komnas HAM, 2013).

Meskipun telah diumumkan oleh Komnas HAM sejak awal bulan September 2018, dugaan keterlibatan Prabowo dalam peristiwa Rumoh Geudong nampaknya belum menjadi sorotan publik maupun media. Mengingat momentum rilis penemuan Komnas HAM yang bertepatan dengan masa kampanye calon presiden 2019, elektabilitas Prabowo akan sangat mungkin terpengaruh jika masyarakat sipil menyoroti perjalanan kasus ini bersama dengan media. Meski demikian, Komnas HAM memastikan bahwa penyelesaian penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang diungkapkan beberapa waktu lalu tidak terkait dengan tahun politik. Dalam hal ini, Imparsial menilai bahwa Komnas HAM telah melaksanakan penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat sesuai koridor hukum tanpa terlibat dalam dinamika politik saat ini, namun menyetujui bahwa isu pelanggaran HAM berat seharusnya memang layak masuk dalam substansi politik elektoral yang sedang terjadi di Indonesia (Tempo, 2018b).

PENUTUP

Dari perspektif HAM, kedua calon presiden sama-sama memiliki catatan yang harus kembali dicermati secara kritis. Rekam jejak masa lalu Prabowo Subianto memang masih menjadi sorotan masyarakat sipil, terutama terkait keterlibatannya sebagai seorang Jenderal semasa Orde Baru, di mana terdapat beberapa dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang disinyalir melibatkan dirinya. Hal ini tentu menjadi catatan penting mengingat penegakan isu HAM

menjadi salah satu fokus era Reformasi, seperti dapat dilihat dari 10 Undang-Undang perlindungan HAM yang ditandatangani dalam kurun waktu 1998-1999 saja.

Pada saat bersamaan, patut pula dicatat bahwa masyarakat sipil masih memandang bahwa Joko Widodo belum membuka ruang efektif bagi perlindungan HAM, termasuk terkait pelanggaran HAM masa lalu. Lebih lanjut komitmen HAM Jokowi pun dinilai masih belum cukup baik dan dalam beberapa kasus, masyarakat sipil secara umum melihat adanya pembiaran pelanggaran HAM, seperti dalam kasus Novel Baswedan bahkan dalam penindaklanjutan rekomendasi DPR RI atas peristiwa 1997-1998 dan keterlibatan Prabowo yang menjadi lawannya dalam Pilpres kali ini.

Berdasarkan rekam jejak yang ada, kedua calon presiden masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam isu HAM yang harus kembali dikerjakan. Meski demikian, isu HAM kelihatannya masih belum akan menjadi fokus, baik semasa kampanye hingga nanti saat salah satu di antara mereka terpilih sebagai Presiden RI. Memang ada sejumlah isu-isu yang terasa lebih realistis dan berdampak langsung terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, namun perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM seluruh rakyat Indonesia akan senantiasa menjadi kewajiban negara, sebagaimana dijamin melalui Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal inilah peran masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mengisi jeda yang ada dalam perhatian pemerintah atas isu HAM, menjadi corong rakyat yang harus senantiasa diperjuangkan hak-haknya, dan sebagai penjaga gawang akan janji penuntasan pelanggaran HAM oleh pemerintah agar tidak lagi menjadi ritual menjelang Pilpres semata.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News (2013, 26 Juni). “Bambang Widjanto: korupsi adalah pelanggaran HAM berat”. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/382193/bambang-widjanto-korupsi-adalah-pelanggaran-ham-berat>.

DPR RI (2009, 29 September). “Laporan Panitia Khusus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang

Secara Paksa Periode 1997-1998”. Diakses dari <https://www.kontras.org/data/LAPORAN%20&%20REKOMENDASI%20PANSUS%20ORANG%20HILANG%20DPR.pdf>.

Imparsial (2018, 10 September). “Imparsial Minta Pimpinan Operasi Militer Dimintai Keterangan terkait Rumah Geudong”. Diakses dari <http://www.imparsial.org/publikasi/berita/imparsial-minta-pimpinan-operasi-militer-dimintai-keterangan-terkait-rumah-geudong/>.

Komnas HAM (2013, Juli). “Ringkasan Eksekutif Hasil Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM pada Masa Daerah Operasi Militer di Provinsi Aceh”. Diakses dari http://lama.elsam.or.id/downloads/224768_Ringkasan_Eksekutif_Tim_Aceh_Masa_Lalu.pdf.

Kompas (2014, 25 April). “23 LSM Indonesia: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/04/25/1751153/23.LSM.Indonesia.Jangan.Pilih.Capres.Pelanggar.HAM>.


KontraS (2018). “Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Kabinet Indonesia Kerja: Sektor Hak Asasi Manusia”. Diakses dari http://kontras.org/buku/20181020_buku_Catatan_Evaluasi_4_Tahun_Pemerintahan_Joko_Widodo_-_Jusuf_Kalla_5bcaa6bc4141b.pdf.

KontraS (2015, 20 Januari). “Siaran Pers: Mabes TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998”. Diakses dari <https://www.kontras.org/home/index.php?id=1990&module=pers>.

Liputan 6 (2018, 2 Agustus). “Disebut Tak Serious Usut Kasus Novel, Polri: Ratusan Saksi Sudah Diperiksa”. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3608376/disebut-tak-serious-usut-kasus-novel-polri-ratusan-saksi-sudah-diperiksa>.

Republika (2018, 13 Januari). “Koalisi LSM desak Pembentukan TGPF Kasus Novel Baswedan”. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/13/p2hrcy383-koalisi-lsm-desak-pembentukan-tgpf-kasus-novel-baswedan>.

- Setara Institute (2016). "Indeks Kinerja HAM 2016". Diakses dari <http://setara-institute.org/indeks-kinerja-hak-asasi-manusia-ham-2016/>.
- Tempo (2018a, 30 September). "Prabowo Calon Presiden, KontraS: Bukti Impunitas Masih Kuat". Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1131564/prabowo-calon-presiden-kontras-bukti-impunitas-masih-kuat/>.
- Tempo (2018b, 9 September). "Komnas HAM: Pengungkapan Kasus di Aceh Tak Terkait Tahun Politik". Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1125054/komnas-ham-pengungkapan-kasus-di-aceh-tak-terkait-tahun-politik/>.
- Tirto.id (2018a, 20 Mei). "Indo Barometer: Prabowo Tak Perlu Cemaskan Isu HAM di Pilpres 2019". Diakses dari <https://tirto.id/indo-barometer-prabowo-tak-perlu-cemaskan-isu-ham-di-pilpres-2019-cKQ1>.
- Tirto.id (2018b, 6 September). "Komnas HAM: Kasus Rumoh Geudong Masuk Pelanggaran HAM Berat". Diakses dari <https://tirto.id/komnas-ham-kasus-rumoh-geudong-masuk-pelanggaran-ham-berat-cXsc>.
- Widodo, Joko (2014). "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkepribadian".



The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan no.98, Jakarta 12560, Indonesia
Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212
e-mail: thc@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id

ISSN 2339-2959



9 772339 295907